

**ANALISIS INDEKS PERSEPSI KORUPSI, STABILITAS POLITIK,
PERTUMBUHAN EKONOMI, KETERBUKAAN PERDAGANGAN, DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI)
DI ASEAN**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMAD VICKI FALDI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

ABSTRAK

ANALISIS INDEKS PERSEPSI KORUPSI, STABILITAS POLITIK, PERTUMBUHAN EKONOMI, KETERBUKAAN PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) DI ASEAN

Oleh

MUHAMAD VICKI FALDI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan infrastruktur terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2010 - 2019 di 10 negara anggota ASEAN menggunakan model FEM (*Fixed Effect Model*). Variabel terikat yang digunakan adalah investasi asing langsung (FDI) dan variabel bebas meliputi indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI).

Kata kunci: Investasi Asing langsung (FDI), Korupsi, Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Perdagangan, Infrastruktur.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CORRUPTION PERCEPTION INDEX, POLITICAL STABILITY, ECONOMIC GROWTH, TRADE OPENNESS, AND INFRASTRUCTURE ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) IN ASEAN

BY

MUHAMAD VICKI FALDI

This study aims to analyze the effect of corruption perception index, political stability, economic growth, trade openness, and infrastructure on foreign direct investment (FDI) in ASEAN. This study uses panel data from 2010 - 2019 in 10 ASEAN countries using FEM (Fixed Effect Model). The dependent variable used is foreign direct investment (FDI) and the independent variables include corruption perception index, political stability, economic growth, trade openness, and infrastructure. The results of the study indicate that corruption perception index, political stability, economic growth, trade openness, and infrastructure have a positive and significant impact on foreign direct investment (FDI).

Keyword: Foreign Direct Investment (FDI), Corruption, Political Stability, Economic Growth, trade openness, and infrastructure.

**ANALISIS INDEKS PERSEPSI KORUPSI, STABILITAS POLITIK,
PERTUMBUHAN EKONOMI, KETERBUKAAN PERDAGANGAN, DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI)
DI ASEAN**

**Oleh
MUHAMAD VICKI FALDI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

Judul Skripsi : Analisis Indeks Persepsi Korupsi, Stabilitas
Politik, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan
Perdagangan, dan Infrastruktur terhadap
Investasi Asing Langsung (FDI) di ASEAN

Nama Mahasiswa : Muhamad Vicki Faldi

No. Induk Mahasiswa : 1711021087

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.
NIP. 19770729 200501 1 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

Penguji II : **Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Agustus 2021

Handwritten signature of Dedy Yuliawan.

Handwritten signature of Dr. Marselina.

Handwritten signature of Dr. Arivina Ratih.



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 September 2021

Penulis



MUHAMAD VICKI FALDI

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Sukabumi pada tanggal 26 Agustus 1999, sebagai putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Patahillah dan Ibu Mila Karmila. Penulis memiliki adik perempuan bernama Cayla Putri Kanaya.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Manar Plus Kota Sukabumi pada tahun 2005. Kemudian menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Cicurug Kabupaten Sukabumi (2005-2011), lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cicurug Kab. Sukabumi (2011-2014), dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Cicurug Kab. Sukabumi (2014-2017).

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis Mengambil konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa), Kepala Reporter di Unit Kegiatan Pers Fakultas (UKPM-F) Pilar FEB Unila 2018/2019, Kepala Divisi 1 Pengkaderan dan Edukasi UKM *Economics' English Club* (EEC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2019/2020.

Pada tahun 2019, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, dan Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020, di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selama 40 hari.

Penulis merupakan Mahasiswa Berprestasi II Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2018 dan 2019, Finalis Mahasiswa Berprestasi FEB Unila tahun 2020, dan peraih beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) tahun 2018 dan 2019. Penulis juga pernah menjadi *Research Asisten* selama satu semester, dan pernah terlibat dalam beberapa *project* penulisan karya ilmiah, salah satunya ialah menjadi penyaji di *Call for Papers & National Seminar 2019* yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan terlibat dalam *The 5th International Summit on Science Technology and Humanity 2019*. Penulis juga aktif dalam bidang *public speaking* dan pernah mendapatkan peringkat 5 dalam perlombaan *newscasting* serta sering terlibat sebagai pembawa acara di berbagai acara Nasional.

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”.

-QS. Ali Imran:139

“A beautiful life does not just happen it is built daily by prayer, humility, sacrifice and hard work”.

-Nishan Panwar

“You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be”.

-Napoleon Hill

“Progress is progress no matter how small”.

-Henry Ford

“If you don't believe in yourself, then you lose”.

-Muhamad Vicki Faldi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

*Dengan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT dberikan,
ku persembahkan skripsi ini kepada keluarga ku tercinta,*

Untuk Kedua Orang Tuaku, Papah Patahillah dan Mamah Mila Karmila

Terimakasih kepada Papah & Mamah yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk kesuksesanku hingga saat ini. Berkat Papah & Mamah lah semuanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran dalam mendidik, nasihat, cinta dan kasih sayang, serta lantunan doa yang tak pernah henti kalian berikan kepadaku hingga menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Untuk Adik ku, Cayla Putri Kanaya

Terimakasih atas semua doa serta dukungannya selama ini, terimakasih juga telah menjadi motivasi dan pengingatku selama hidup.

Untuk Pendamping Hidupku Kelak

Serta

Almamater tercinta

Universitas Lampung

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Indeks Persepsi Korupsi, Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Perdagangan dan Infrastruktur Terhadap Masuknya Investasi Asing Langsung (FDI) di ASEAN**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen penguji yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas seminar proposal yang telah memberikan tanggapan, kritikan dan juga sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
10. Papah dan Mamah tercinta, bapak Patahillah dan Ibu Mila Karmila yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang terbaik kepada penulis, serta adikku tercinta, Cayla Putri Kanaya, terima kasih untuk semua doa serta dukungannya selama ini. Semoga Naya bisa melakukan pencapaian yang lebih baik dari Kakak.
11. Sahabat-sahabat semasa kuliah, Kak Ridho dan Rully, serta anak-anak Himalang: Kirun, Rais, Galang, Ulul, Putri, Rizka, April, dan Reza yang telah setia menemani penulis selama proses perkuliahan. Terima kasih atas semua kebaikan, motivasi, doa serta dukungan kalian dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga telah memberikan cerita dan kenangan menarik selama masa perkuliahan ini. *I love you guys, so much!*
12. Sahabat semasa sekolah, Jajaran Genjang (JG), Aliza, Aul, Feli, Sopi, Cita, Ramdan, Hanrival, Aldi, Dyas, Devi, Memet, serta seluruh anggota kelas Domino'5. Terima kasih atas bantuan, semangat, penghiburan serta kesetiaan yang telah kalian berikan kepada penulis. Sukses terus untuk kalian semua.
13. Presidium EEC 2020, Nanda, Ami, Atika, Valen, Acai, (Alm) Andika, Bella, Shinta, Kevin, Intan, Gusti, Octa, Zetta, Redho, Renja, Rully, Arvan, Olin.

Terima kasih telah memberikan pengalaman, pengajaran, serta hiburan dalam menjalankan organisasi selama 1 periode. Kalian semua adalah keluarga keduaku. *See you on top, guys!*

14. Kakak, teman, adik EEC tersayang, Kak Ridho, Kak Khomsa, Kak Tika, Kak Jovita, Ara, Diajeng, Andre, Mona, Kinar, Jaza, Bagas, Hanna, Tiwi, dll. Terima kasih atas penghiburan dan semangatnya selama ini.
15. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017, dan juga teman-teman sekonsentrasi ekonomi publik dan fiskal, Intan, Dina, Adin, dll. yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020, Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Ami, Retno, Bundo, Fajar, bang Marion, Dian. Terima kasih atas cerita, kenangan, pengalaman dan kesabaran kalian selama 40 hari kebersamaan kita. Semoga sukses untuk kita semua.
17. Almamater yang kebanggakan, Universitas Lampung.
18. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
19. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for being me at all times.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2021

Penulis

Muhamad Vicki Faldi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	15
1. Fungsi dan Peran Pemerintah	15
2. Investasi	16
3. Korupsi.....	21
4. Ekonomi Politik.....	27
5. Pertumbuhan Ekonomi.....	33
6. Keterbukaan Perdagangan	34
7. Infrastruktur.....	36
B. Tinjauan Empiris	37
C. Kerangka Pemikiran.....	40
D. Hipotesis.....	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Data	43

B. Definisi Operasional Variabel.....	44
1. Investasi Asing Langsung.....	44
2. Indeks Persepsi Korupsi.....	44
3. Stabilitas Politik.....	44
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	45
5. Keterbukaan Perdagangan	45
6. Infrastruktur.....	46
C. Metode Analisis	46
D. Prosedur Analisis Data.....	48
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	48
2. Metode Estimasi Regresi Data Panel	48
3. Pemilihan Metode Regresi Data Panel.....	50
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	51
5. Pengujian Hipotesis	53
6. Koefisien Determinasi (R^2)	55

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	56
B. Uji Asumsi Klasik	57
1. Uji Normalitas.....	57
2. Uji Multikolinieritas	61
3. Uji Heterokedastisitas	62
4. Uji Autokorelasi.....	62
C. Hasil Pengujian Regresi Data Panel.....	63
1. Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian.....	63
2. Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel	65
3. Pengujian Hipotesis	65
4. Koefisien Determinasi (R^2)	66
D. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Masuknya <i>Foreign Direct Investment</i>	68
2. Pengaruh Stabilitas Politik Terhadap Masuknya <i>Foreign Direct Investment</i>	70
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Masuknya <i>Foreign Direct Investment</i>	72
4. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Masuknya <i>Foreign Direct Investment</i>	74
5. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Masuknya <i>Foreign Direct Investment</i>	75

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	80

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perbandingan FDI <i>inflow</i> di beberapa Kawasan	3
Gambar 1.2 <i>Foreign Direct Investment, net inflows</i> Tahun 2010-2019 (USD).....	4
Gambar 1.3 <i>Corruption Perception Index</i> di ASEAN 2010-2019.....	6
Gambar 1.4 Perkembangan <i>Political Stability and Absence of Violence/Terrorism</i> di ASEAN 2010-2019	8
Gambar 1.5 Perkembangan GFCF di ASEAN Tahun 2010-2019	11
Gambar 1.6 Pengeluaran Kesehatan di ASEAN Tahun 2010-2018	12
Gambar 2.1 Peta <i>Corruption Perception Index</i>	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 <i>Boxplot</i>	59
Gambar 4.2 <i>Boxplot</i>	60
Gambar 4.3 Uji Normalitas	61
Gambar 4.4 Uji Tabel Durbin-Watson.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas, Correlation	61
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	62
Tabel 4.4 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	64
Tabel 4.7 Hasil Regresi Model FEM	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan.....	66
Tabel 4.9 Nilai Individual Effect Intersep 10 negara anggota ASEAN.....	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penghambat perekonomian negara-negara berkembang tidak dapat tumbuh secara optimal bukan karena permasalahan modal dan teknologi saja, akan tetapi masalah kelembagaan pun bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Azansyah (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran penting kelembagaan dalam perekonomian adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian. Turunnya ketidakpastian tersebut akan membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Septiantoro dkk., (2020) yang mengatakan bahwa kondisi kelembagaan, politik dan demokrasi yang baik dapat mengurangi biaya transaksi yang merupakan faktor penting dalam perhitungan pendapatan investasi dan pertimbangan perusahaan asing dalam menanamkan investasi di luar negeri.

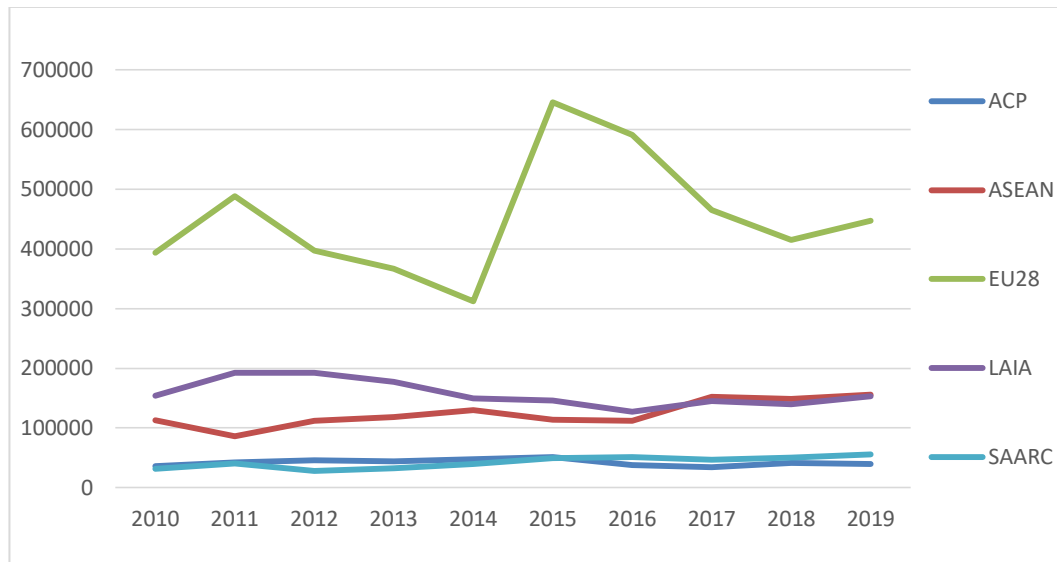
Sementara itu, negara-negara berkembang cenderung memiliki kualitas kelembagaan dan stabilitas politik yang rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Kualitas kelembagaan yang rendah di negara-negara berkembang dapat memunculkan berbagai fenomena yang menyebabkan tingginya biaya transaksi, salah satunya ialah korupsi. Menurut Bardhan (1997) dalam Quazi (2014) secara teoritis korupsi dapat berperan sebagai *grabbing hand* dengan menaikkan biaya transaksi bagi investor asing. Biaya tambahan yang timbul dari membayar komisi kepada politisi/ birokrat untuk kontrak besar atau menyuap pejabat setempat untuk mendapatkan izin, koneksi, perlindungan polisi, penilaian pajak, dll. dapat meningkatkan biaya keseluruhan dalam menjalankan bisnis dan menurunkan profitabilitas investasi. Selain itu korupsi juga dapat menimbulkan risiko kehilangan reputasi dan *brand goodwill* jika terjerat dalam skandal korupsi

internasional (Zhao et al., 2015). Lebih lanjut, korupsi menciptakan distorsi pasar dengan memberikan akses *preferensial* kepada perusahaan korup ke pasar yang menguntungkan (Habib and Zurawicki, 2002). Akhirnya, korupsi dapat berdampak negatif pada determinan penting FDI, seperti pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995), produktivitas investasi publik dan kualitas infrastruktur (Tanzi and Davoodi, 1997), serta layanan pendidikan dan perawatan kesehatan (Gupta et al., 2000).

Negara-negara di ASEAN sebagian besar merupakan negara berkembang. Menurut World Bank (2017), Negara-negara di ASEAN masuk dalam 3 klasifikasi yaitu, negara dengan pendapatan menengah-bawah (*lower-middle income/ LMC*) seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Negara dengan pendapatan menengah-atas (*upper-middle income/ UMC*) yaitu Malaysia dan Thailand. Negara berpendapatan tinggi (*high income/ HC*) yaitu Brunei Darussalam dan Singapura. Secara umum, negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah, menengah-bawah, dan menengah-atas. Negara-negara berkembang yang juga disebut sebagai negara dunia ketiga memiliki berbagai masalah dan kesulitan yang kurang lebih sama misalnya kemiskinan absolut yang tinggi, tingkat pengangguran & setengah menganggur yang tinggi, kesenjangan distribusi pendapatan, kurang memadainya fasilitas kesehatan & pendidikan, serta terus meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri (Todaro, 2006). Di samping kesamaan masalah yang dimiliki, negara berkembang juga memiliki keberagaman kondisi ekonomi, serta struktur sosial dan politik. Keberagaman itulah yang menjadi daya tarik negara-negara investor untuk menanamkan investasi di negara-negara berkembang.

Wilayah yang luas dan populasi penduduk besar, yaitu sebesar 654 juta penduduk dengan capaian *Gross Domestic Product (GDP)* USD 2 miliar, membuat wilayah ASEAN memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang dapat mendorong aliran investasi asing langsung (FDI) masuk ke wilayah ASEAN. Tidak hanya itu, ASEAN juga memiliki potensi yang cukup menarik untuk mengundang investasi masuk, seperti letak yang strategis, skala ekonomi, kekayaan sumber daya alam,

tenaga kerja yang berlimpah, potensi pasar, serta kebijakan ekonomi terbukanya. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong ASEAN menjadi mata rantai penting dalam rantai produksi internasional *Transnational Corporation* (TNC) dan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan serta tujuan yang menarik bagi investor.



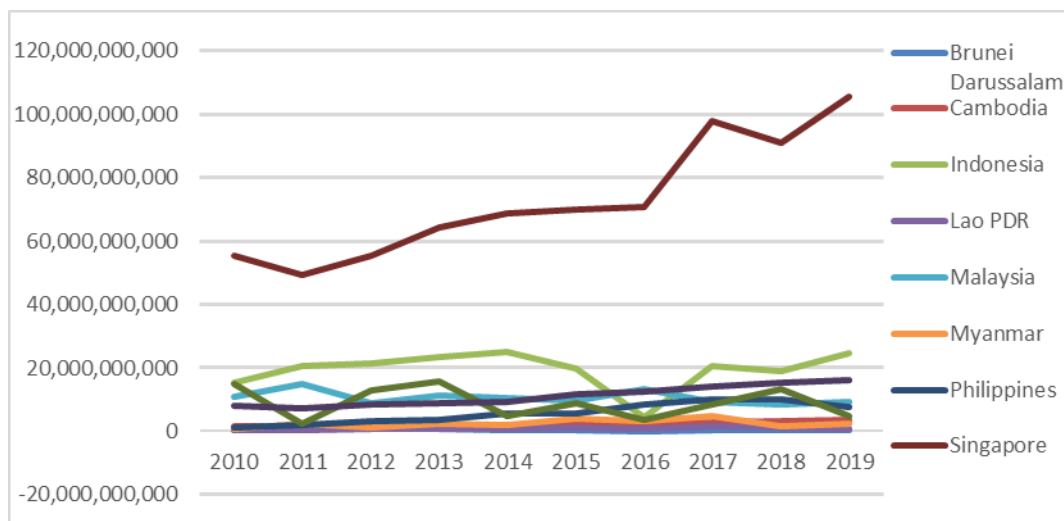
Sumber: UNCTAD (2021), data diolah.

Gambar 1.1 Perbandingan FDI inflow di beberapa Kawasan

Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mendorong aliran masuk *foreign direct investment* (FDI) ke wilayahnya. Berdasarkan Gambar 1.1 Kawasan ASEAN berada di posisi kedua setelah *European Union* (EU28), serta berada lebih baik dibandingkan dengan *Latin American Integration Association* (LAIA), *African, Caribbean and Pacific Group of States* (ACP) dan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC). Hal tersebut menunjukkan kondisi FDI di ASEAN cukup baik di antara kawasan-kawasan lainnya. Menurut Todaro (2006) investor lebih senang berinvestasi ke negara-negara berkembang yang mempunyai perekonomian yang dinamis serta negara-negara industri maju. Hal ini sangat cocok dengan ASEAN karena Negara-negara di ASEAN yang terdiri dari banyak negara berkembang yang memiliki kondisi ekonomi yang dinamis serta keberagaman kondisi sosial ekonominya. Tidak hanya itu, di ASEAN juga terdapat negara maju seperti Singapura dan Brunei Darussalam.

Menurut Saputra (2008) dalam Putri (2018) banyaknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke Kawasan ASEAN tentu saja dapat mendatangkan banyak manfaat seperti membawa teknologi yang lebih tinggi, meningkatkan kompetisi dalam perekonomian negara penerima investasi, mendorong peningkatan investasi domestik, dan keuntungan dalam mengakses pasar ekspor. Analisis menggunakan teori neoklasik menjelaskan bahwa FDI merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Peningkatan FDI dianggap penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI di suatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, knowhow, management skill*, risiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*.

Namun perlu dipahami bahwa investor asing tidak begitu saja menanamkan modalnya ke suatu negara, perlu adanya iklim investasi yang kondusif karena iklim investasi yang kondusif memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor asing untuk menanamkan modalnya ke suatu negara. Maka dari itu, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kondusifitas iklim investasi di negara-negara ASEAN.



Sumber : World Bank (2020), data diolah.

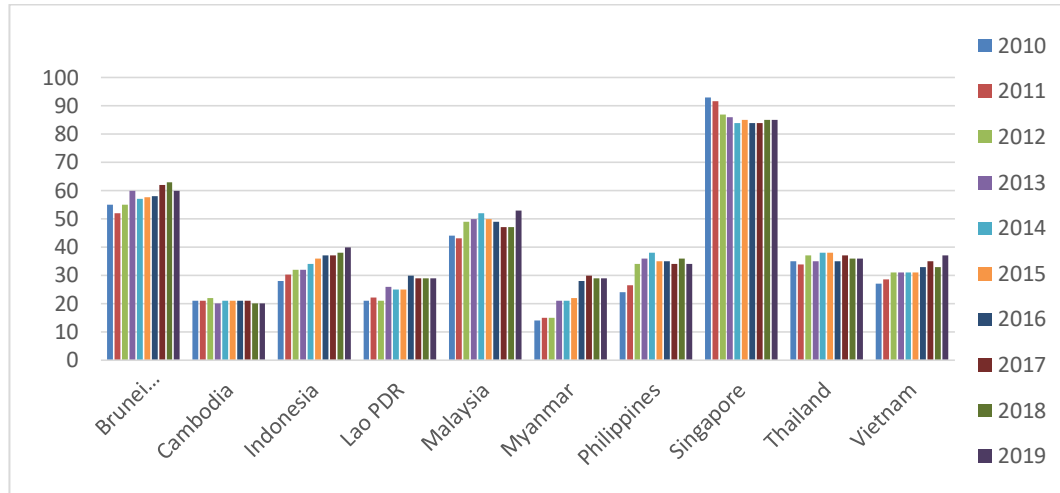
Gambar 1.2 *Foreign Direct Investment, net inflows* Tahun 2010-2019 (USD)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, jumlah *Foreign Direct Investment net inflows* pada 10 negara anggota ASEAN dari tahun 2010-2019 menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data dari *World Bank* tersebut, dapat dilihat bahwa investasi asing langsung di kawasan ASEAN menunjukkan tren yang cenderung timpang, antara negara Singapura yang tergolong negara maju dan negara anggota ASEAN lainnya yang tergolong negara sedang berkembang. Hal tersebut diduga karena perusahaan multinasional (MNEs) sangat mempertimbangkan karakteristik dan risiko negara tuan rumah sebelum menanamkan investasinya, termasuk kualitas institusi dan keberadaan korupsi.

Menurut Quéré (2007) ada beberapa alasan mengapa kualitas institusi penting untuk menarik FDI. Salah satunya berakar pada hasil literatur pertumbuhan, yaitu: dengan meningkatkan prospek produktivitas, infrastruktur tata kelola yang baik dapat menarik investor asing. Alasan kedua adalah bahwa kualitas instansi yang buruk dapat membawa biaya tambahan untuk FDI. Contohnya ialah kasus korupsi. Alasan ketiga adalah, karena *sunk costs* yang tinggi, FDI sangat rentan terhadap segala bentuk ketidakpastian, termasuk ketidakpastian yang berasal dari efisiensi pemerintah yang buruk, pembalikan kebijakan, korupsi atau lemahnya penegakan hak milik dan sistem hukum secara umum. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraeni dan Sulasmiyati (2019) yang mengatakan bahwa para investor asing sangat memperhatikan beberapa risiko investasi sebelum membuat keputusan investasi. Salah satu risiko tersebut adalah *Country risk*, yaitu kondisi suatu negara yang dapat dilihat dari berbagai sektor, seperti sektor keamanan, politik dan kepastian hukum. Kepastian dalam perlindungan hukum salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari tindakan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat mencerminkan rendahnya kualitas birokrasi dan keamanan serta kepastian hukum pada suatu negara, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan seorang investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Untuk melihat seberapa baik institusi di suatu negara, kita bisa lihat tingkat persepsi korupsi di negara-negara tersebut dengan menggunakan data Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang diteliti oleh *Transparency*

International Forum. Kriteria indeks korupsi ini berkisar dari 0 sampai dengan 100, di mana 0 berarti praktik korupsi di negara tersebut sangat tinggi, sedangkan 100 berarti negara tersebut bersih dari praktik korupsi.



Sumber : *Transparency International (2020), data diolah.*

Gambar 1.3 *Corruption Perception Index* di ASEAN 2010-2019

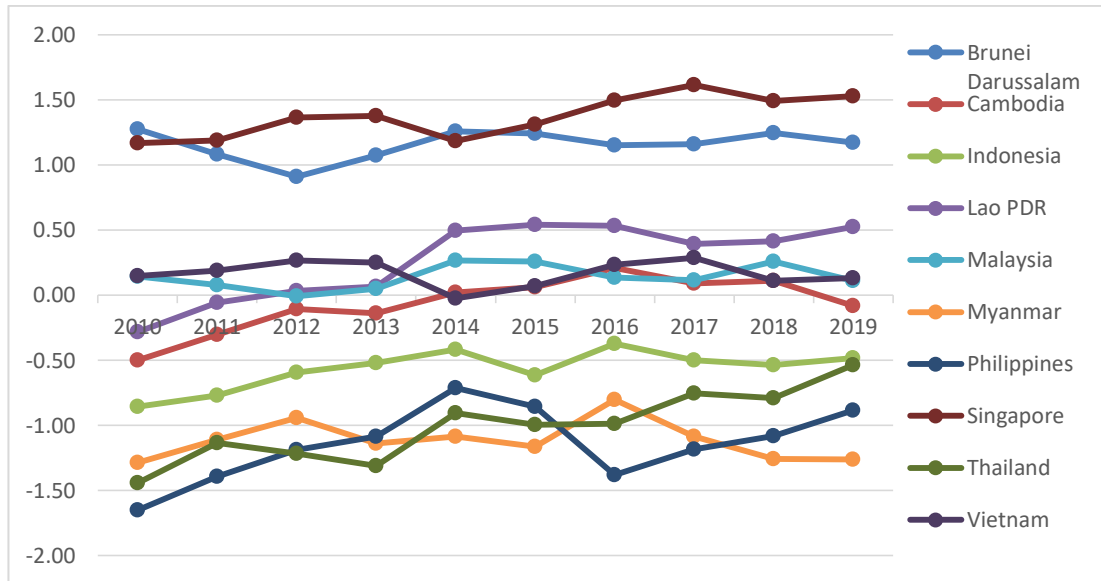
Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Persepsi Korupsi di Negara anggota ASEAN cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Terlihat pula dalam gambar bahwa Negara Singapura memiliki indeks persepsi korupsi yang tertinggi di wilayah ASEAN disusul dengan Brunei Darussalam dan Malaysia yang juga memiliki indeks korupsi cukup tinggi, ini berarti intensitas praktik korupsi di negara-negara tersebut tergolong rendah. Sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Filipina, Laos, dan Kamboja memiliki tingkat persepsi korupsi yang cukup rendah, yang artinya intensitas praktik korupsi di negara-negara tersebut tergolong tinggi dan rawan akan tindakan korupsi, serta memiliki kepastian hukum yang rendah.

Sama halnya dengan korupsi, keadaan politik di suatu negara juga akan berdampak pada keputusan seorang investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Menurut Moosa (2002), risiko politik suatu negara merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh para investor asing. Risiko politik tersebut terkait dengan penyitaan atau perusakan properti, gangguan produksi, pembatasan operasional yang menghambat kemampuan investor dalam melakukan tindakan tertentu, kerusuhan, dan perubahan lingkungan peraturan atau

manajemen ekonomi makro (Rashid et al., 2017). Sejalan dengan hal tersebut *Global Investment Competitiveness (World Bank, 2017)* menginformasikan tentang pandangan dan perilaku investor global pada negara sedang berkembang. Survei ini dilakukan melalui wawancara tahun 2017 dengan sampel 754 eksekutif bisnis internasional di negara berkembang. Hasil dari survei ini menangkap persepsi para investor bahwa faktor stabilitas politik, keamanan, dan lingkungan birokrasi yang baik merupakan faktor terpenting dalam pengambilan keputusan investor. Stabilitas politik keamanan mencakup keadaan negara berkenaan dengan gangguan negatif yang bersifat politis mencakup sosial, ekonomi, dan militer yang dapat memengaruhi stabilitas pembangunan. Stabilitas politik penting untuk menciptakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum agar dapat menjamin stabilitas nasional dan kelancaran dalam pembangunan nasional (Septiantoro et al., 2020).

Selain itu, menurut Kaufmann et al. (2011) ketidakstabilan politik di suatu negara dapat mengganggu siklus bisnis dan aktivitas ekonomi. Alhasil, ketika Negara dihadapkan dengan ketidakstabilan politik maka Negara tersebut akan terhambat pertumbuhan ekonominya. Shahzad et al. (2012) mengatakan bahwa stabilitas politik adalah faktor sangat penting dalam memengaruhi kondisi makroekonomi dan iklim bisnis suatu negara. Investor cenderung tertarik untuk berinvestasi di negara yang mempunyai iklim usaha yang stabil dan kondusif. Stabilitas politik yang terjaga dapat menarik arus masuk FDI ke suatu negara.

Sehubungan dengan kebijakan yang dibentuk oleh sebuah sistem pemerintahan, pemerintah sendiri memiliki peran penting dalam menarik perhatian para investor asing. Pemerintah di berbagai negara di dunia bertujuan untuk menarik minat para penanam modal asing (Marin and Schnitzer, 2011). Melihat peranannya yang penting, pemerintah hendaknya menyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Misalnya, dengan membuat produk-produk kebijakan yang dapat menjaga kestabilan di negaranya, kestabilan tersebut meliputi kestabilan politik, kestabilan hukum dan ekonomi. Iklim investasi yang baik tersebut akan mendorong optimalisasi keuntungan masuknya aliran modal asing bagi negara bersangkutan (Kok and Ersoy, 2009).



Sumber : World Governance Indicators, World Bank (2020), data diolah.

Gambar 1.4 Perkembangan *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* di ASEAN 2010-2019

Political stability and absence of violence/terrorism mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan/atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme. Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan *political stability and absence of violence/terrorism* di ASEAN tahun 2010 hingga 2019. Kondisi *political stability and absence of violence/terrorism* di ASEAN cukup berfluktuatif dari tahun 2010–2019. Negara dengan *political stability and absence of violence/terrorism* paling baik adalah Negara Singapura lalu disusul oleh Negara Brunei Darussalam, hal ini karena Singapura memiliki pemerintah yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan penyediaan sarana yang memadai, serta memiliki pasukan militer terbaik di Asia Tenggara. Brunei Darussalam juga merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, yang menyebabkan stabilitas politik dan ekonominya lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya. Sebaliknya, negara dengan tingkat stabilitas politik terburuk adalah Negara Myanmar.

Selain faktor-faktor yang berkaitan dengan institusi tersebut, tentu terdapat variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap FDI, salah satunya ialah kondisi makro ekonomi suatu negara. Alemu (2012) mengatakan bahwa sampai saat ini, terdapat satu kesepakatan bahwa alasan utama perusahaan multinasional (MNCs)

berinvestasi karena fundamental ekonomi yang kuat di negara-negara *host country*. Misalnya, besarnya ukuran pasar, lingkungan ekonomi makro yang stabil, ketersediaan tenaga kerja terampil dan infrastruktur, yang mempengaruhi daya tarik negara terhadap arus masuk FDI.

Untuk dapat melihat fundamental ekonomi tersebut, kita dapat melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Menurut Alemu (2012) pertumbuhan ekonomi yang di proksi oleh pertumbuhan GDP di suatu negara secara berkelanjutan menunjukkan ekonomi yang dinamis. Oleh karena itu, pemerintah yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di masa lalu kemungkinan akan menarik lebih banyak investor asing ke negaranya. Kebijakan masa lalu paling berguna dalam memprediksi masa depan di negara-negara dengan pemerintahan yang stabil. Misalnya, menurut Fan et al. (2007) dalam Alemu (2012) investor asing berbondong-bondong berinvestasi ke negara China untuk mengantisipasi perbaikan institusi dengan didorong oleh kinerja pertumbuhan masa lalu. Selain itu, hipotesis ukuran pasar berpendapat bahwa masuknya FDI ke suatu negara adalah fungsi dari ukuran pasar negara tuan rumah, yang dapat diukur dengan GDP atau pertumbuhan populasi. Menurut Bhattacharya et al. (1996) dan Chen *and* Khan (1997) dalam Alemu (2012) karena ukuran pasar yang besar dapat menghasilkan skala ekonomi, pasar yang terus berkembang akan meningkatkan prospek potensi pasar yang dapat meningkatkan daya tarik FDI.

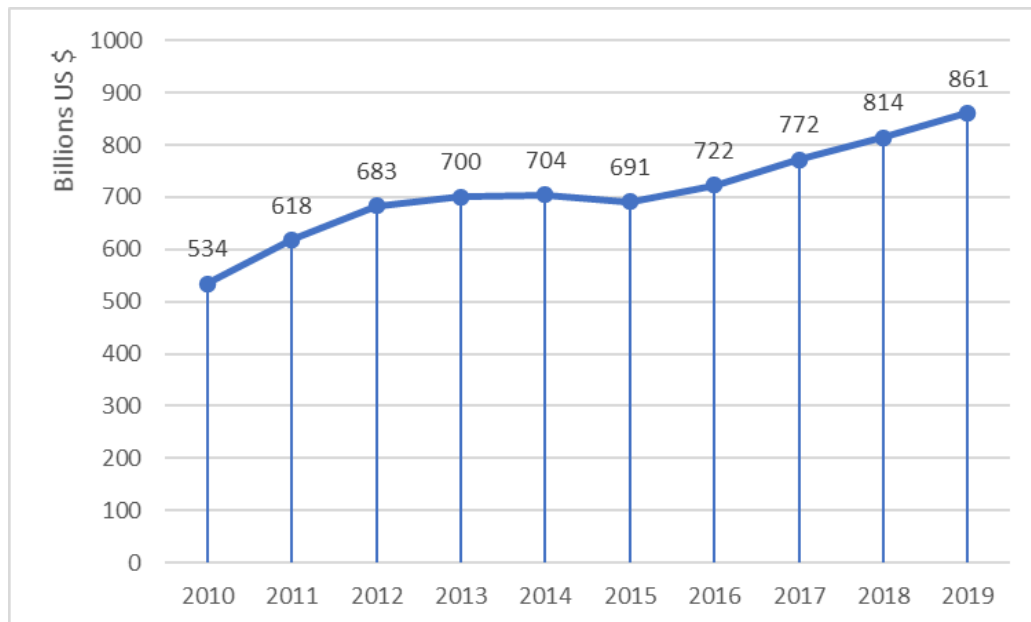
Selanjutnya faktor-faktor lain seperti keterbukaan perdagangan juga turut mempengaruhi aliran FDI yang masuk di negara-negara berkembang. Menurut Indrayani et al., (2016) Keterbukaan perdagangan mengacu pada tingkat di mana Negara atau Ekonomi mengizinkan atau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Kegiatan perdagangan meliputi impor dan ekspor, investasi antar negara, pinjam meminjam, dan repatriasi dana ke luar negeri. Semakin banyak suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain, maka negara tersebut semakin terbuka ekonominya. Ekonomi yang terbuka berarti peluang pasar yang lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investor asing untuk berinvestasi.

Selain itu, menurut Abdella et al. (2018) dan Shah (2014) keterbukaan perdagangan yang digunakan sebagai ukuran liberalisasi mengungkapkan bahwa peningkatan keterbukaan negara tuan rumah menyebabkan lebih banyak FDI yang masuk karena hambatan perdagangan yang semakin rendah di negara tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Hoang (2012) menyatakan bahwa dengan adanya *trade openness* yang tinggi di suatu negara, maka *trade barrier* di negara tersebut semakin kecil, hal ini membuka kesempatan bagi investor asing untuk dapat memanfaatkan keunggulan komparatif *host country* tersebut untuk dapat melakukan *re-export*. Selain itu, dampak positif dari liberalisasi perdagangan juga menegaskan argumen bahwa reformasi pasar dan pembukaan ekonomi mengarah pada pengurangan hambatan administratif dan menciptakan lingkungan bisnis yang baik di negara tuan rumah, menyampaikan sinyal yang tepat kepada komunitas bisnis internasional, dan dengan demikian meningkatnya keterbukaan perdagangan suatu negara dapat meningkatkan aliran masuk FDI.

Keterbukaan perdagangan (*trade openness*) merupakan ukuran kebijakan untuk mengatur arus barang dan jasa secara internasional baik dalam bentuk membatasi maupun memperlonggar hubungan internasional antarnegara. Menurut Waugh and Ravikumar (2016) dalam Abdella et al., (2018) Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*) adalah jumlah impor dan ekspor suatu negara dalam kaitannya dengan ukuran ekonominya, oleh karena itu variabel *trade openness* dapat diukur dengan menggunakan total nilai ekspor dan impor suatu negara per GDP negara tersebut.

Selanjutnya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shah (2014) dan Indrayani et al. (2016), terciptanya kondisi investasi yang kondusif ditandai juga dengan ketersediaan infrastruktur yang ada di suatu negara. Ketersediaan infrastruktur sangat penting bagi negara tuan rumah dalam meningkatkan daya tarik investor luar negeri. Hal ini menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur di suatu negara dapat memengaruhi FDI yang masuk ke negara tersebut. Infrastruktur sendiri menurut *World Bank* dibagi menjadi tiga yaitu infrastruktur ekonomi, sosial dan institusi. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik

yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi meliputi *public utilities* (tenaga telekomunikasi, air, sanitasi, dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dsb). Infrastruktur sosial meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi. Serta infrastruktur administrasi/institusi seperti penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

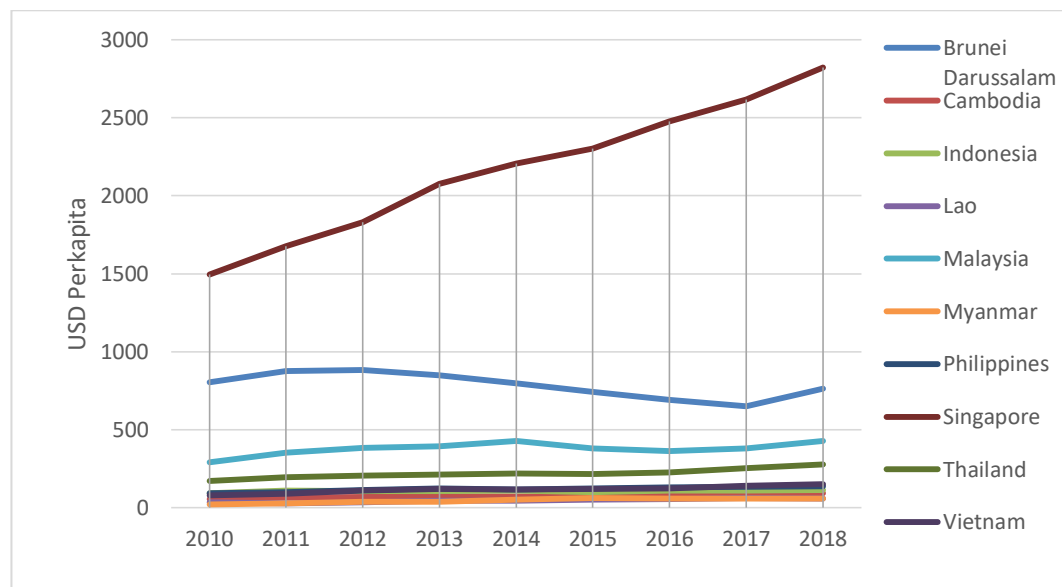


Sumber: WDI (2020), data diolah.

Gambar 1.5 Perkembangan GFCF di ASEAN Tahun 2010-2019

Kondisi infrastruktur di 10 Negara anggota ASEAN cukup baik, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.5 di atas. *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) merupakan agregat dari berbagai bentuk pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur ekonomi (pembangunan jalan raya, pelabuhan, rel kereta) dan juga infrastruktur sosial (pembangunan dalam pendidikan dan kesehatan). Dalam gambar 1.5 tersebut GFCF ASEAN selalu meningkat, hal ini berarti pembangunan infrastruktur di ASEAN selalu meningkat setiap tahunnya. Namun, meskipun kondisinya cukup baik, ternyata terdapat ketimpangan yang tinggi di antara negara-negara di ASEAN yang di dominasi oleh Negara Singapura. Misalnya pada kondisi infrastruktur sosial yang dilihat dari *proxy* pengeluaran untuk kesehatan (Gambar 1.6). Negara Singapura memiliki nilai yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, yaitu memiliki

rata-rata sebesar 2005.43 USD per kapita, sangat jauh jika dibandingkan dengan Negara Myanmar yang hanya sebesar rata-rata sebesar 15.77 USD per kapita.



Sumber: WDI (2020), data diolah.

Gambar 1.6 Pengeluaran Kesehatan di ASEAN Tahun 2010-2018

Maka dari itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan dan meratakan kondisi infrastruktur di negara-negara anggota ASEAN. Contohnya ialah program *ASEAN Master Plan of Connectivity (AMPC)* yang diluncurkan tahun 2010 yang memiliki target terhubungnya seluruh kawasan ASEAN melalui jalan raya, kereta, dan pelabuhan. Sistem transportasi seperti ini merupakan dasar bagi integrasi Kawasan untuk pergerakan barang, jasa, modal, serta penduduk, sekaligus untuk mendorong pengembangan pariwisata dan perdagangan. Kemudian, program “*One Belt, One Road*” (OBOR) yang diprakarsai Tiongkok juga membuat semakin terhubungnya negara-negara ASEAN. Sama seperti AMPC, program OBOR pun ingin meningkatkan konektivitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui program OBOR ini Tiongkok ingin menghidupkan Kembali “Jalur Sutra” sebagai poros ekonomi yang menghubungkan 65 negara di tiga benua. Kedua program tersebut pada akhirnya dapat mengatasi persoalan pendanaan infrastruktur di negara-negara ASEAN.

Tidak hanya itu, negara-negara di ASEAN juga sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur antara lain ialah Indonesia, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sangat gencar melakukan pembangunan

infrastruktur. Salah satunya ialah program tol laut yang rencananya akan membuat pelabuhan-pelabuhan laut baru yang bersinggungan dengan proyek AMPC. Ada 24 pelabuhan yang disiapkan dengan kebutuhan investasi Rp59 triliun untuk periode 2015-2019. Sebagian besar dana itu yaitu Rp41 triliun digunakan untuk lima pelabuhan di Kuala Tanjung, Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Kemudian proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dan pelabuhan hub internasional di Bitung dan Belawan atau Kuala Tanjung merupakan fokus pada 2017, serta pelabuhan Bitung dan Belawan yang akan menghubungkan Indonesia dengan Filipina dan Thailand. Tidak hanya di Indonesia, ASEAN juga sepakat menetapkan jaringan rute kapal *Roll On/Roll Off* (Ro-Ro) untuk membawa kargo beroda yang diharapkan dapat memangkas waktu bongkar muat barang dari dan/atau ke Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia yang dijadwalkan terealisasi pada 2016-2017. Selain itu, program *The Sustainable Development Goals* (SDG's) yang saat ini di galakkan oleh seluruh negara di dunia pun mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan bagi setiap negara dan penyediaan infrastruktur merupakan salah satu tujuan dari SDG's, yakni tujuan No. 9. Upaya-upaya tersebut diharapkan agar perekonomian di ASEAN dapat meningkat dan menurunkan ketimpangan yang ada serta membuat investor nyaman berinvestasi di ASEAN.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur terhadap masuknya Investasi Asing Langsung (FDI) di 10 negara anggota ASEAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan yang dapat mendukung tujuan pemerintah.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman baru serta dapat mendorong adanya penelitian-penelitian lainnya mengenai topik yang serupa dengan metode yang berbeda.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Fungsi dan Peran Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian, baik itu sistem perekonomian kapitalis maupun sistem perekonomian sosialis, pemerintah suatu negara memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Mangkoesoebroto (1994) peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori fungsi pemerintah Adam Smith, pemerintah suatu negara hanya mempunyai tiga fungsi:

- 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- 2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Akan tetapi, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Oleh karena itu, dalam perekonomian modern, peranan pemerintah diharapkan semakin besar untuk mengatur jalannya perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian modern dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan:

- 1) Alokasi, yaitu peranan pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dan agar lebih optimal penggunaannya.
- 2) Distribusi, yaitu peranan pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatan dan menyejahterakan masyarakat.
- 3) Stabilisasi, yaitu peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap.

Sementara itu, Barton (2000) dalam (Sasana, 2004) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah:

- 1) peran alokasi sumber daya,
- 2) peran regulator,
- 3) peran kesejahteraan sosial,
- 4) peran mengelola ekonomi makro.

Penjelasan ke empat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi.
3. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (*transfer payment*) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat.
4. Peran pengelolaan ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, *full employment*, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan dengan tujuan mengganti dan menambah barang-barang modal perekonomian (Sukirno, 2006). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal,

penanaman modal dibedakan menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

b. Pengertian Investasi Asing

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam pasal 1 angka (3), penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

c. Motivasi Investasi Asing

Yusgiantoro (2004); Yuliati dan Prasetyo (2002) dalam Arshita dan Mawardi (2018) berpendapat bahwa terdapat 5 faktor motivasi yang melatarbelakangi terjadinya investasi asing yaitu :

a) Pencari Pasar

Pencarian pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor produk ke luar negeri.

b) Pencari Faktor Produksi

Untuk mendapatkan bahan mentah atau faktor produksi tertentu yang akan digunakan dalam proses produksi.

c) Pencari Efisiensi Produksi

Memproduksi produk di negara dengan biaya produksi yang lebih rendah untuk mendapatkan biaya produksi yang murah atau efisien sehingga produk dapat bersaing.

d) Pencari Pengetahuan

Untuk memproduksi produk di luar negeri sehingga mendapatkan dukungan teknologi atau keahlian manajemen dalam suatu proses produksi.

e) Pencari Kestabilan Politik

Memproduksi produk di luar negeri yaitu di tempat yang mempunyai stabilitas politik yang tinggi sehingga tidak mungkin negara tersebut mengambil alih atau ikut campur pada urusan perusahaan swasta.

d. Jenis Investasi Asing

Menurut Griffen and Pustay (2015), investasi asing dibagi menjadi dua kategori. Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada masalah pengendalian. Dimana investor dapat memilih untuk memiliki peran manajemen aktif dalam sebuah perusahaan atau hanya menginginkan pengembalian dari investasi pasif. Dua jenis investasi tersebut yaitu :

a) Investasi Portofolio Asing

Mewakili kepemilikan sekuritas pasif seperti saham, obligasi atau aset finansial asing lainnya, yang tidak satu pun di antaranya memberikan manajemen aktif atau pengendalian atas penerbit sekuritas oleh investor.

b) Investasi Asing Langsung

Akuisisi terhadap aset asing dengan tujuan mengendalikannya.

e. *Foreign Direct Investment (FDI)*

FDI adalah akuisisi terhadap aset asing dengan tujuan untuk mengendalikannya. FDI dapat berbentuk pembelian aset yang ada di sebuah negara asing, investasi baru dalam properti, pabrik, peralatan dan partisipasi joint venture dengan mitra lokal (Griffen and Pustay, 2015). Sedangkan menurut OECD, FDI adalah kategori investasi lintas batas yang dibuat oleh penduduk dalam suatu negara dengan tujuan membangun keuntungan jangka panjang dalam suatu perusahaan yang merupakan penduduk negara lain.

Menurut Yusgiantoro (2004) dalam Arshita dan Mawardi (2018), FDI dilakukan dengan investasi asing langsung melalui penanaman modal, personalia dan melakukan operasi bisnis langsung di negara tujuan dengan tiga strategi yaitu merebut pangsa pasar yang lebih besar, efisiensi biaya produksi dan meningkatkan daya saing. FDI dilakukan dengan dua alasan utama yaitu ekspor yang sering kali dibatasi oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan serta keterbatasan pemberian lisensi (Hill (2014) dalam Arshita dan Mawardi (2018)).

f. Teori *Foreign Direct Investment*

1) *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*

Teori ini dikemukakan oleh Keynes di tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money*, menurut Keynes, (1936) ketika seseorang membeli atau menanamkan modalnya dalam suatu aset modal atau investasi maka orang tersebut membeli keuntungan di masa depan yang didapat dari penjualan dikurangi biaya produksi, selama masa hidup aset tersebut. MEC adalah perolehan bersih yang diharapkan atas dasar pengeluaran modal tambahan. Harus digarisbawahi bahwa *marginal efficiency of capital* mencakup dua pokok penting yaitu *expectation of yield* atau harapan keuntungan di masa yang akan datang dan *current supply price* atau nilai sekarang dari aset kapital. MEC sangat bergantung pada tingkat keuntungan yang diharapkan (*rate of return expected*) apabila dana tersebut diinvestasikan ke dalam suatu proyek baru, dan bukan dari pengalaman hasil keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut di masa yang lalu.

2) *The Organization Location dan Internalization (OLI) Framework*

Dikemukakan oleh Jhon Dunning (1997, 1981, 1988) dalam Amalia, (2017) dengan memadukan tiga teori utama Penanaman modal asing (FDI) yaitu: a. Teori Organisasi Industrial b. Teori Internalisasi c. Teori Lokasi. Menurutnya ada tiga kondisi yang harus dimiliki perusahaan yang ingin melakukan penanaman modal asing (FDI) : a. Harus memiliki keunggulan kepemilikan dibandingkan pihak/perusahaan lain. b. Lebih menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut daripada menjual ataupun menyewakannya ke perusahaan lain. c. Bisa lebih menguntungkan jika berkombinasi dengan faktor/*input* yang berlokasi di luar negeri. Teori yang dikemukakan John Dunning ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing, khususnya mengenai perkembangannya terhadap FDI.

3) *Teori Multinational Corporation*

Teori ini dikemukakan oleh Rugman (1981). Teori ini menyatakan bahwa ada pengaruh dari variabel lingkungan dan variabel internalisasi dalam melakukan penanaman modal asing (FDI). Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi

perhatian yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi yang dimaksud adalah fungsi produksi keseluruhan bangsa. Didefinisikan faktor dalam masyarakat yaitu tenaga kerja (*Labor*), modal (*Capital*) dan dalam model yang maju dimasukkan variabel teknologi, ketersediaan sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Variabel non-ekonomi dalam melakukan penanaman modal asing (FDI) adalah variabel politik, budaya dan sosial di setiap bangsa yang berbeda-beda. Kenyataannya tidak ada suatu negara yang memiliki faktor ekonomi dan non-ekonomi yang identik antar negara. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis internasional, akan mempelajari lebih dalam budaya, sistem politik, dan nilai sosial untuk meminimalkan biaya tambahan dari penanaman modal asing pada produksi di negara terkait. Faktor internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan (KSP) merupakan faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal asing di suatu negara. Pada hakekatnya perusahaan multinasional adalah suatu monopoli sepanjang perusahaan tersebut memiliki metode yang khas untuk mengorganisasi pasar internalnya.

4) Teori Moosa

a) The Differential Rate of Return Hypothesis

Teori yang menyatakan bahwa aliran modal dari suatu negara ke negara lain dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dalam suatu proses yang cepat. FDI dapat ditentukan dengan mempertimbangkan marginal *return* dan marginal *cost*.

b) The Portfolio Diversification Hypothesis

Teori ini menyatakan keputusan dalam berinvestasi terhadap suatu proyek tidak hanya di tentukan oleh tingkat pengembalian tetapi juga besarnya risiko yang dihadapi. Investor dapat dikelompokkan menjadi tingkatan yaitu; 1) *Risk averse*, merupakan sifat yang menghindari risiko sehingga investor memilih risiko rendah walaupun terkadang konsekuensinya dengan *return* yang rendah; 2) *risk medium*, merupakan sifat yang proporsional melihat risiko dengan berinvestasi pada risiko sedang pada *return* tertentu; 3) *risk taker*, merupakan sifat yang berani mengambil risiko dengan berinvestasi yang memberikan tingkat keuntungan yang besar tanpa memedulikan konsekuensi risiko yang lebih tinggi.

c) *The Output and Market Size Hypothesis*

Teori ini menyatakan bahwa besarnya FDI yang mengalir ke suatu negara tergantung besarnya *output* dari perusahaan multinasional di negara tersebut atau besarnya ukuran pasar dari negara tersebut yang diukur berdasarkan GDP.

d) *The Currency Areas Hypothesis*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan suatu negara yang mempunyai nilai mata uang yang kuat dibandingkan dengan negara lain akan cenderung melakukan investasi.

g. Manfaat *Foreign Direct Investment*

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007, manfaat dari penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia

(*behavior*) serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*), korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa. Menurut *World Bank*, korupsi didefinisikan "*the abuse of public power for private benefit*", penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi diartikan bukan hanya kepada seseorang, tetapi juga kepada suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga.

Definisi di atas juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Bentuk dan motif korupsi dapat berbeda-beda, yaitu dijelaskan sebagai berikut (Stückelberger, 2010):

- a. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*), umumnya disebut korupsi kecil (*petty corruption*), yaitu berakar dalam kemiskinan. Sebagai contoh jika pegawai-pegawai pemerintah tidak menerima gaji atau gajinya tidak mencukupi untuk kehidupan.
- b. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*), umumnya disebut korupsi besar (*grand corruption*), yaitu berakar dari adanya nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
- c. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*), dimaksudkan untuk mendapat barang atau pelayanan yang jika tanpa korupsi tidak bisa diperoleh atau tidak tepat waktu atau hanya dengan biaya administratif yang lebih besar.

Menurut Aditjondro (2003) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Lapis Pertama
Penyuapan (*bribery*), yaitu di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.
- b. Korupsi Lapis Kedua
Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis di antara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.
- c. Korupsi Lapis Ketiga
Jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional, di mana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga pengutang dan atau lembaga internasional yang punya otoritas

dibidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Korupsi cenderung mengalihkan pengeluaran pemerintah dari wilayah sosial menuju pembangunan proyek yang tidak dibutuhkan atau investasi dengan kualitas yang lebih rendah di bidang infrastruktur. Di negara-negara yang paling korup, politisi korup cenderung memilih proyek investasi bukan berdasarkan basis ekonomi intrinsik mereka, namun pada kesempatan untuk suap dan suap proyek ini hadir. Korupsi dapat mempengaruhi pembentukan modal manusia, yang merupakan *input* terpenting dalam proses produksi dan transformasi yang disebut pembangunan ekonomi.

b. Teori Tingkat Korupsi

Perilaku korupsi seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Means – Ends Scheme Robert, teori ini dikemukakan oleh Robert Merton yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.
- b. Teori Vroom, teori ini dikemukakan oleh Victor H, Vroom yang menyatakan bahwa korupsi merupakan nilai negatif dari harapan seseorang untuk mencapai sesuatu. Teori ini memandang bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang.
- c. Teori Robert Klitgaard, teori ini menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Teori Gane, teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Ilustrasi teori ini terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi

yang meliputi keserakahan (*greeds*), kesempatan (*opportunities*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposure*).

e. Mengukur Tingkat Korupsi

Untuk mengukur suatu tingkat korupsi perlu disepakati terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut *World Bank*, korupsi yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini terlalu luas cakupannya bukan hanya pada sektor internal suatu negara tetapi eksternal (swasta).

Korupsi sulit untuk dikuantifikasikan, namun kita dapat mengetahui ketika kita melihatnya. Setiap studi akhirnya memilih ukuran korupsi dengan persepsi tentang korupsi (*perception of corruption*). Beberapa persepsi tentang korupsi yaitu sebagai berikut:

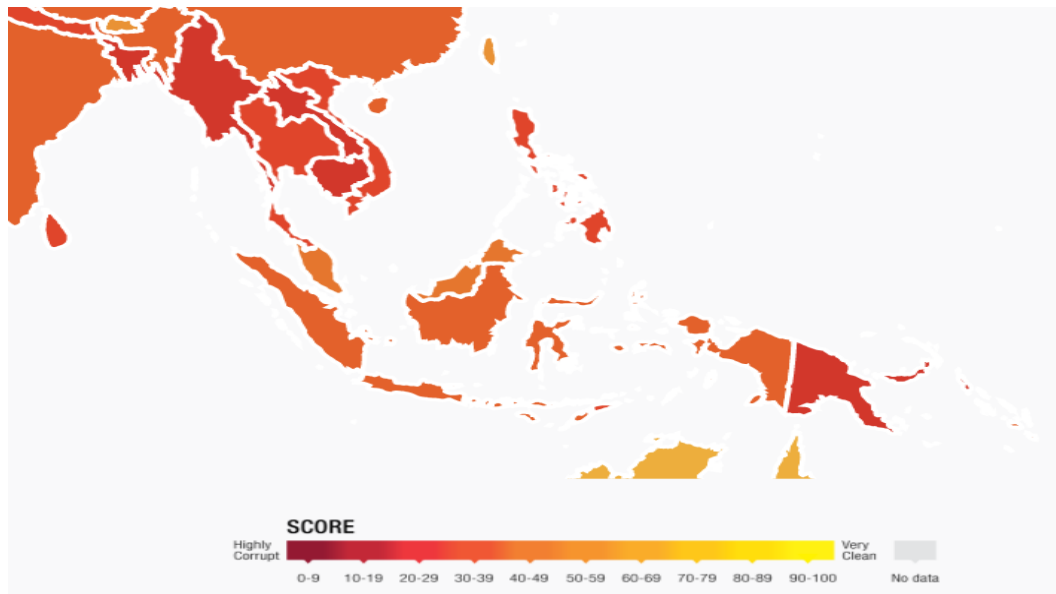
1. *Business International Index* (BII), indeks ini diperoleh berdasarkan berbagai survei atas persepsi terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh para ahli dan konsultan di beberapa negara. *Business International Index* (BII) memberikan peringkat negara-negara dalam skala 1 sampai 10, menurut derajat di mana suatu transaksi bisnis melibatkan korupsi atau pembayaran yang mencurigakan.
2. *International Country Risk Guide Index* (ICRG), indeks ICRG diterbitkan setiap tahun oleh *Political Risk Service*, sebuah perusahaan risiko investasi swasta. Seperti halnya BII, indeks ini juga didasarkan atas pendapat dan persepsi para ahli terhadap permintaan pejabat publik akan pembayaran khusus serta pembayaran tak resmi lainnya.
3. *Global Corruption Report Index* (GCR), indeks korupsi GCR diperoleh berdasarkan persepsi para manajer perusahaan atas praktik korupsi di suatu negara. Indeks untuk suatu negara tertentu adalah rata-rata dari seluruh peringkat menurut para responden dari negara tersebut.
4. *Transparency International Index* (TI), *Transparency International* berdiri sejak 1995, sebuah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan di Jerman, telah menghasilkan indeks korupsi, berdasarkan bobot rata-rata dari sekitar sepuluh survei yang mencakup berbagai bidang. Indeks ini memberi peringkat

negara-negara dalam 1 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam penelitian ini, data korupsi yang digunakan adalah data *Corruption Perception Index* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. *Corruption Perception Index* (CPI) mengacu pada 13 survei yang berbeda dan penilaian dari 12 lembaga yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

- Bank Pembangunan Afrika
- *Bertelsmann Foundation*
- *Economist Intelligence Unit*
- *Freedom House*
- *Global Insight*
- *International Institute for Management Development*
- *Politik dan Economic Risk Consultancy*
- *Politik Risk Services*
- *World Economic Forum*
- Bank Dunia dan Dunia Proyek keadilan

Negara harus dinilai oleh setidaknya tiga sumber untuk tampil di CPI. Terdapat 13 survei atau penilaian yang baik didapat dari para petinggi bisnis, opini survei lembaga, ataupun penilaian kinerja dari sekelompok analis bersertifikasi. CPI tidak menggunakan survei opini publik semenjak tahun 2002 setelah teori standarisasi diberlakukan. Hal itu dilakukan agar hasil CPI menjadi lebih akurat. CPI menjadi alat ukur persepsi korupsi karena sulitnya mengukur tingkat mutlak korupsi dengan skala 0-100, di mana skala 100 menunjukkan tingkat korupsi pada negara tersebut sangat rendah.



Sumber: *Transparency Internasional (2020)*
 Gambar 2.1 Peta *Corruption Perception Index*

Dari gambar 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa tingkat persepsi korupsi di ASEAN rata-rata rendah. Nilai yang didapat di negara Thailand, Filipina dan Vietnam masih berada di kisaran 20-29 hingga 30-39. Hanya Negara Singapura saja yang memiliki warna terang dengan nilai sekitar 80-89. Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat ASEAN pada pemberantasan korupsi masih tergolong rendah dan tingkat korupsi yang masih tinggi. Padahal, korupsi bisa memperlambat pergerakan investasi pada masa masyarakat ekonomi ASEAN kelak.

4. Ekonomi Politik

a. Pengertian Ekonomi Politik

Istilah ekonomi politik pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis, Antoyne de Monchétien (1575–1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Pada masa itu, pasar dianggap masih belum berkembang, sehingga tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan perekonomian seperti perdagangan berada di tangan pemerintah. Namun, pada akhir abad ke-18, banyak yang menentang pandangan tersebut karena pemerintah dianggap bukanlah agen yang baik, dan justru menghalangi masyarakat mencapai kesejahteraan. Para ahli

ekonomi memperdebatkan masalah tersebut, dan hal ini melahirkan banyak aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik.

Pendekatan ekonomi politik secara definitif dapat dimaknai sebagai hubungan keterkaitan antara aspek politik, proses politik, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, seperti produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan sebagainya (Carporaso dan Levine, (1992) dalam Yustika (2012). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diperkenalkan oleh pemerintah. Ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan, namun mereka bisa disandingkan, dengan pertimbangan bahwa mereka mempunyai proses yang sama.

Ada dua tipe ekonomi yang bisa diterapkan dalam model kebijakan politik, baik sebagai penasihat otentik bagi partai yang berkuasa, ataupun sebagai intelektual yang menempatkan kebijakan sebagai instrumen untuk memecahkan hambatan ekonomi politik. Sedangkan dalam model kebijakan ekonomi, terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, yakni pendekatan yang berbasis pada pemaksimalan kesejahteraan konvensional dan pendekatan yang bersandarkan pada asumsi ekonomi politik. Pendekatan ini sering juga disebut dengan “ekonomi politik baru” atau sering dikenal dengan sebutan *new political economy*.

b. Jenis-jenis Ekonomi Politik

1) Teori Pilihan Publik (*Public Choice/ PC*)

Teori ini lahir dari anggapan pendekatan ekonomi politik baru tentang negara/pemerintah, politisi, atau birokrat sebagai agen yang mempunyai kepentingan sendiri. Teori pilihan publik melihat aktor-aktor individu sebagai pusat kajian. Teori PC ini mendeskripsikan bahwa secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat. Singkatnya, dalam proses semacam itu, setiap formulasi kebijakan dan dukungan dianggap sebagai proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik.

Pada level yang lebih luas, teori pilihan publik bisa diterjemahkan sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik (*application of economic methods to politics*). Atau dalam pengertian yang hampir mirip, dikatakan bahwa secara esensi teori pilihan publik berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisa ekonomi ke dalam proses non-pasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik komprehensif terhadap intervensi negara dalam ekonomi pasar (Dollery and Wallis (2001) dalam Yustika (2012)).

Aplikasi pendekatan pilihan publik ke dalam sektor publik memiliki beberapa kendala akut, yang kemudian terangkum dalam sebutan kegagalan pemerintah (*government failures*). Seperti diungkapkan oleh O'Dowd, bahwa kegagalan pemerintah bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berikut: ketidakmungkinan yang melekat/otomatis (*inherent impossibilities*), kegagalan politik (*political failures*), dan kegagalan birokrasi (*bureaucratic failures*). Ketidakmungkinan yang melekat merujuk kepada kondisi di mana negara/pemerintah tidak dapat melakukan sesuatu secara simpel/serhana. Sementara, kegagalan politik bisa dideskripsikan bahwa tujuan intervensi pemerintah secara konsepsional sangat bagus (*feasible*), tetapi adanya rintangan-rintangan politik dalam operasi pemerintahan menyebabkan ketidakmungkinan untuk mencapai tujuan dari intervensi tersebut. Terakhir, kegagalan birokrasi bermakna bahwa intervensi negara sulit dilakukan karena secara administratif aparat dan organ birokrasi tidak sanggup (*incapable*) untuk mengimplementasikan kebijakan menurut tujuan/niat semula. Ketiga bentuk kegagalan pemerintah inilah yang kemudian melahirkan sinisme terhadap 'peran negara' dalam (kegiatan) perekonomian Dollery and Wallis (2001) dalam Yustika (2012).

2) Teori *Rent-Seeking*

Kegiatan mencari rente (*rent-seeking*) adalah upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dan dapat juga didefinisikan salah perolehan pendapatan di atas normal dalam pasar yang kompetitif. Asumsi awal konsep *rent-seeking* yang

dibangun dari teori ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan (*self-interest*) berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki, seperti lobi, akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut. Persoalannya adalah jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, maka implikasi yang muncul bisa sangat besar. Seperti diungkapkan Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan (*decision-making*) berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru (Olson, (1982) dalam Yustika (2012)).

Secara lebih jelas, Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente, seperti lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin, akan mendistorsi alokasi sumber daya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Demikian halnya dengan contoh sehari-hari yang biasa dijumpai di negara berkembang, di mana pejabat pemerintah menjual posisinya untuk merekrut tenaga kerja. Pada saat pejabat pemerintah tersebut menerima uang sebagai imbalan atas jasanya memasukkan seseorang menjadi pegawai tanpa kompetensi yang memadai, maka implikasinya kinerja (ekonomi) negara tersebut akan buruk karena ditangani pegawai-pegawai yang tidak cakap (Tullock, (1980) dalam Yustika (2012)). Pada kategori ini, *rent-seeking behavior* tidak saja membuat alokasi sumber daya ekonomi menjadi melenceng, tetapi juga secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dibuat, menurut perspektif politik, pertama-tama harus dianalisis sampai sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi memunculkan perilaku mencari rente/kegiatan korupsi (Yustika, 2012).

Beberapa hal dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente di atas. Pertama, bahwa masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik (*property right*) yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Tentu saja dalam analisis ekonomi tidaklah relevan untuk membicarakan apakah kegiatan mencari rente tersebut mengambil bentuk secara ilegal maupun legal, meskipun

kegiatan korupsi ataupun kegiatan ilegal lainnya bisa mengurangi legitimasi pemerintah. Kedua, bahwa setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, keseimbangan politik (*political equilibrium*) mungkin dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba untuk mendapatkan fasilitas istimewa pula. Ketiga, bahwa di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Dalam konteks ini, ideologi menjadi determinan penting yang akan menuntun bentuk kepentingan pemerintah (Krueger, 2000).

3) Teori *Redistributive Combines* dan Keadilan

Menurut Rachbini (1996) dalam pola *redistributive combines* ini sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulit di lingkungan terbatas puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat *privilege* khusus. Dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola *redistributive combines* ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan *rule of law* di bidang ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi bersedia mengabdikan pada sistem politik dengan pola *redistributive combines* tersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa.

Relasi antara teori *redistributive combines* yang dikembangkan oleh de Soto dengan teori keadilan (*theory of justice*) yang dibangun oleh John Rawls bisa dilacak dari dua logika berikut. Pertama, teori *redistributive combines* mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara/pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok (ekonomi) yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Masalahnya, negara/pemerintah bukanlah agen netral, tetapi organ yang memiliki kepentingan (seperti yang diasumsikan dalam teori pilihan publik). Akibatnya, kebijakan yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kelompok kepentingan (ekonomi) dan pemerintah

sering kali hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain sehingga muncul isu ketidakadilan.

c. Stabilitas Politik

Studi penelitian “*Why doesn't capital flow from rich to poor countries?*” Lucas (1990) menjelaskan stabilitas politik sebagai salah satu elemen yang memengaruhi FDI. Butler and Joaquin (1998) menyatakan pengaruh stabilitas politik terhadap biaya modal bergantung pada *return* dari investasi yang diharapkan. Penting bagi investor untuk melihat iklim investasi di Negara tujuan dalam menentukan keputusan mereka. Secara umum, selama perusahaan (Negara asal) dapat mendirikan cabang atau perusahaan baru di Negara penerima tanpa risiko berlebih mereka akan terus mengalirkan modalnya.

La Porta et al., (1999) melakukan penelitian dengan mengurutkan sistem pemerintahan di seluruh negara, hasil dari penelitian menyatakan negara maju memiliki stabilitas politik yang lebih stabil dari pada negara berkembang. Penjelasan tersebut memperkuat asumsi stabilitas politik dan perubahan sistem pemerintahan mempengaruhi arus FDI (Tuman and Emmert, 2004). Alhasil, sistem politik yang berubah-ubah dan sistem pemerintahan yang tidak stabil menyebabkan risiko politik yang akhirnya mempengaruhi arus FDI.

d. Indeks Stabilitas Politik

Indeks Stabilitas Politik (*Political Stability Index*) adalah indeks yang mengukur stabilitas suatu negara, standar pemerintahan yang baik, catatan tatanan konstitusional, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan kekuatan demokrasi secara keseluruhan. Indeks ini diterbitkan oleh World Bank. Indeks Stabilitas Politik ini dihitung berdasarkan catatan transisi kekuasaan yang berlaku di suatu negara, kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya.

Indeks ini mengukur dinamika antara kualitas pemerintah suatu negara dan ancaman yang dapat membahayakan dan melemahkan stabilitas. Ancaman yang dimaksud di sini di antaranya adalah kudeta, ketidakstabilan, terorisme, dan lain-lain. Penghitungan nilai Indeks Stabilitas Politik dilakukan dengan survei berdasarkan 10 kriteria, yaitu:

- 1) Catatan transisi kekuasaan (pemilihan umum yang bebas dan adil; kepatuhan terhadap kesepakatan politik)
- 2) Catatan representasi demokrasi
- 3) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan terhadap hak-hak sipil
- 4) Kekuatan sistem yurisprudensi, kepatuhan pada tatanan konstitusional, dan pemerintahan yang baik
- 5) Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya
- 6) Ancaman kudeta, dan pemberontakan
- 7) Tingkat kejahatan yang tidak terkendali dan korupsi
- 8) Risiko terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan nasional
- 9) Hubungan dengan kekuatan regional dan komunitas internasional, catatan kerja sama bilateral atau multilateral
- 10) Tingkat perselisihan ekonomi (yaitu tantangan ekonomi dan keuangan).

Berdasarkan penilaian terhadap 10 kriteria tersebut, dihasilkan *estimate of governance* (perkiraan tata kelola) dengan rentang -2.5 sampai 2.5 *governance performance* (kinerja tata kelola). Skor -2.5 menunjukkan tingkat terendah stabilitas politik, sementara skor 2.5 menunjukkan tingkat tertinggi stabilitas politik.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro and Smith, 2003). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping

itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto atau PDB sama halnya dengan pendapatan nasional di suatu negara. Menurut Sukirno (2015) dalam bukunya menyatakan bahwa dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara. Selain itu, menurut Saidi et al., (2013) tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) suatu negara dapat digunakan untuk mengukur besarnya ukuran pasar, semakin besar dan semakin meningkatnya ukuran pasar di suatu negara, maka pangsa FDI negara tersebut akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$\Delta PDB = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

ΔPDB = Laju Pertumbuhan Ekonomi.

PDB_t = Produk Domestik Bruto tahun t.

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya.

6. Keterbukaan Perdagangan

Keterbukaan perdagangan (*Trade Openness*) adalah salah satu akibat dari adanya keterbukaan ekonomi yang menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Menurut Indrayani et al. (2016) keterbukaan perdagangan mengacu pada tingkat di mana Negara atau Ekonomi mengizinkan atau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Semakin banyak suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain, maka negara tersebut semakin terbuka ekonominya. Ekonomi yang terbuka berarti

peluang pasar yang lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investor asing untuk berinvestasi.

Shah (2014) dan Indrayani et al. (2016) mengukur keterbukaan perdagangan dengan menggunakan jumlah impor dan ekspor suatu negara dalam kaitannya dengan ukuran ekonominya. Oleh karena itu, secara sistematis *trade openness* dapat diartikan sebagai penjumlahan ekspor dan impor suatu negara dibagi dengan GDP negara tersebut:

$$TO = \frac{X + M}{PDB}$$

Di mana:

TO = Trade Openness

X = Ekspor

M = Impor

PDB = Produk Domestik Bruto

Keuntungan dari keterbukaan ekonomi melalui keterbukaan perdagangan ialah terbukanya akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Abdella et al., (2018) menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan menjadi pertimbangan perusahaan asing ketika memutuskan untuk beroperasi di negara-negara BRIC. Temuan ini menggambarkan bahwa investor asing lebih menyukai negara-negara yang memiliki pergerakan perdagangan yang mudah.

Selain itu, keterbukaan perdagangan merupakan sesuatu yang penting karena dapat mendorong perusahaan multinasional untuk membangun bisnis di negara tersebut dengan tujuan mendapatkan peluang yang lebih tinggi untuk dapat mengekspor produk dari negara tuan rumah dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Oleh karena itu, semakin banyak negara yang terbuka untuk berdagang, semakin besar kemungkinan negara tersebut dapat menarik modal investor asing ke dalam perekonomian mereka (Abdella et al., 2018).

7. Infrastruktur

Grigg dalam Arinta (2018) mendefinisikan infrastruktur sebagai suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan- bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Selain itu Mankiw (2010) menambahkan bahwa infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur bersifat jangka panjang, hal ini berkaitan dengan pembiayaan dan pemeliharaan.

Hansen dalam Arinta (2018) menyatakan bahwa infrastruktur ekonomi secara langsung dapat mendukung kegiatan produksi, misalnya: jalan, bandara, pelabuhan, jaringan limbah, jaringan pipa air bersih, jaringan listrik dan irigasi. Lain halnya dengan infrastruktur sosial, infrastruktur ini dibangun untuk kenyamanan sosial dan dibangun dalam rangka mendukung produktivitas ekonomi, seperti: sekolah, rumah sakit, gedung olahraga dan lain-lain. Pada jenis infrastruktur yang ketiga yaitu infrastruktur kelembagaan merujuk pada norma, lembaga-lembaga dan prosedur serta nilai-nilai dalam masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan ekonomi.

Septiantoro et al., (2020) memproksikan infrastruktur dengan *gross fixed capital formation* (GFCF), menurutnya variabel GFCF secara tidak langsung menjadi proksi dari pembangunan infrastruktur di suatu negara. Hal ini sejalan dengan definisi dari World Bank (2018) yang menyatakan bahwa *gross fixed capital formation* (GFCF) terdiri dari pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. GFCF tersebut dapat berbentuk perbaikan lahan; pembelian pabrik, mesin, dan peralatan; dan pembangunan jalan, kereta api dan sebagainya, termasuk sekolah, rumah sakit, kantor, tempat tinggal pribadi, serta bangunan komersial dan industri.

Selain itu, menurut Indrayani et al. (2016) dan Fahmi (2012) pemilihan GFCF sebagai *proxy* infrastruktur ini didasarkan pada anggapan bahwa pengukuran infrastruktur lain seperti jalan, telepon dan pelabuhan, hanya mencerminkan infrastruktur yang ada dan bukan infrastruktur potensial seperti yang termasuk

dalam GFCF. Oleh karena itu, GFCF dianggap mewakili baik infrastruktur yang ada maupun yang potensial.

B. Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian, penulis mempelajari penelitian yang berkaitan dan relevan dengan topik yang sedang ditulis dan telah ditulis oleh penulis sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut dijelaskan dalam ringkasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
1.	Rahim M. Quazi (2014) Judul: “ <i>Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Economic Study</i> ”	Alat Analisis: Regresi Data Panel Variabel: 1. <i>Corruption Perception Index</i> , 2. <i>Foreign Direct Investment</i> , 3. <i>Economic Freedom Index</i> , 4. <i>Rate of Return</i> , 5. <i>Infrastructure</i> , 6. <i>Human Capital</i> , 7. <i>Market Size</i> , 8. <i>Political Stability</i> , 9. <i>Region</i> .	Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan investor asing akan lebih baik dengan perekonomian negara tuan rumah, apabila stabilitas politik lebih baik, ukuran pasar lebih besar, pengembalian atas investasi yang lebih tinggi, dan kemudahan akses dari baiknya infrastruktur akan meningkatkan modal FDI <i>inflow</i> , tetapi tingkat korupsi menyebabkan sebaliknya.
2.	Aye Mengistu Alemu (2012) Judul: “ <i>Effects of Corruption on FDI Inflow in Asian Economies</i> ”	Alat Analisis: Regresi Data Panel Variabel: 1. <i>Foreign Direct Investment</i> , 2. <i>Freedon from Curuption Index</i> . 3. <i>Economic Growth</i> 4. <i>Human Capital</i> 5. <i>GDP/capita</i> 6. <i>Infrastructure</i> 7. <i>Interest Rate</i> 8. <i>Openness</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap masuknya FDI. (Kenaikan 1% tingkat korupsi akan menurunkan 9,1% FDI) Selain itu, semua variabel lain dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap masuknya FDI.

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
3.	Abdelaziz Hakimi and Helmi Hamdi (2017) Judul: “Does Corruption limit FDI and Economic Growth? Evidence from MENA Countries”	Alat Analisis: Model koreksi kesalahan panel (<i>panel vector error correction model</i>) dan teknik kointegrasi (<i>cointegration technique</i>) Variabel: 1. PDB per kapita, 2. Indeks ICRG, 3. <i>Foreign Direct Investment</i> , 4. Investasi domestik, 5. Jumlah kredit ke sektor swasta (CPS).	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Korupsi akan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB per kapita dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ditemukan bahwa tingkat korupsi yang lebih rendah memperbaiki dampak investasi asing langsung (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, untuk tingkat korupsi yang tinggi merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi karena mempengaruhi kegiatan investasi dan arus masuk investasi asing langsung.
4.	Mohsin Habib and Leon Zurawicki (2002). Judul: “Corruption and Foreign Direct Investment”	Alat Analisis: OLS regression & PROBIT model Variabel: 1. <i>Foreign Direct Investment</i> , 2. <i>Corruption Perception Index</i> ,	Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan argumen yang disajikan dalam literatur dan menunjukkan bahwa korupsi merupakan hambatan serius (Berdampak negatif) bagi investasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa investor asing pada umumnya menghindari korupsi karena dianggap salah dan dapat menimbulkan inefisiensi operasional.
5.	Ahmed Berhan Abdella, Navaz Naghavi, Benjamin Chan Yin Fah (2018)	Alat Analisis: Model regresi kointegrasi Panel <i>Fully Modified Ordinary Least Squares (FM-OLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen (Korupsi) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Dependent</i>

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Judul: “ <i>The effect of corruption, trade openness and political stability on foreign direct investment: Empirical evidence from BRIC countries</i> ”	Variabel: 1. <i>Foreign Direct Investment</i> , 2. <i>Corruption</i> , 3. <i>Trade Openness</i> , 4. <i>Political Stability</i>	<i>Variable</i> (FDI) di negara-negara BRIC. Sedangkan dua Variabel Independen lainnya (Keterbukaan Perdagangan dan Stabilitas Politik) berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung di negara-negara BRIC.
6.	Mamunur Rashid, Xuan Hui Looi, Shao Jye Wong (2017). Judul: “ <i>Political stability and FDI in the most competitive Asia Pacific countries</i> ”	Alat Analisis: <i>Fixed effect, GMM-system, and Panel ARDL tests</i> Variabel: 1. <i>FDI</i> , 2. <i>GDP</i> , 3. <i>Trade openness</i> , 4. <i>Inflation</i> , 5. <i>Political stability</i> .	<i>GDP, Trade openness</i> , dan <i>Political stability</i> memengaruhi aliran masuk FDI secara positif, sedangkan tingkat inflasi berdampak negatif pada aliran masuk FDI di negara-negara tertentu. Stabilitas politik merupakan variabel yang paling berpengaruh dengan adanya indikator lainnya.
7.	Yosra Saidi, Anis Ochi, Houria Ghadri (2013) Judul: “ <i>Governance and FDI Attractiveness: Some Evidence from Developing and Developed Countries</i> ”	Alat Analisis: <i>Fixed effects panel regressions</i> Variabel: 1. <i>Foreign Direct Investment</i> , 2. <i>Political Stability</i> , 3. <i>Regulatory quality</i> , 4. <i>Rule of law</i> , 5. <i>Voice and accountability</i> , 6. <i>Corruption and bureaucratic red tape</i> , 7. <i>Government effectiveness</i> , 8. <i>Inflation rate</i> , 9. <i>Balance of payments current account</i> , 10. <i>GDP Growth Rate</i> ,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dua indikator <i>governance</i> yaitu, stabilitas politik dan kualitas peraturan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap aliran masuk FDI. Ini menunjukkan bahwa investor asing tertarik pada stabilitas politik dan kualitas peraturan dalam pilihan investasi mereka di luar negeri. Penelitian ini juga menemukan bahwa <i>market size, trade openness, infrastructure quality, the current account deficit</i> berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI.

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
		11. <i>Openness of the economy</i> 12. <i>Infrastructure Indeks</i>	
8	Shah, (2014) Judul: “ <i>The Significance of Infrastructure for FDI Inflow in Developing Countries</i> ”	Alat Analisis: Regresi Data Panel 1) <i>Foreign Direct Investment</i> 2) <i>Market Size</i> 3) <i>Economic Development</i> 4) <i>Openness</i> 5) <i>Macroeconomic Stability</i> 6) <i>Infrastructure Availability</i>	Ukuran pasar, nilai tukar, perkembangan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan ketersediaan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDI, sementara inflasi yang tinggi menghalangi investor asing.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan gabungan ide-ide dari penelitian terdahulu yang di satukan dan diperbaharui baik dari tempat penelitian, waktu penelitian, dan variabel-variabel independen yang dipakai.

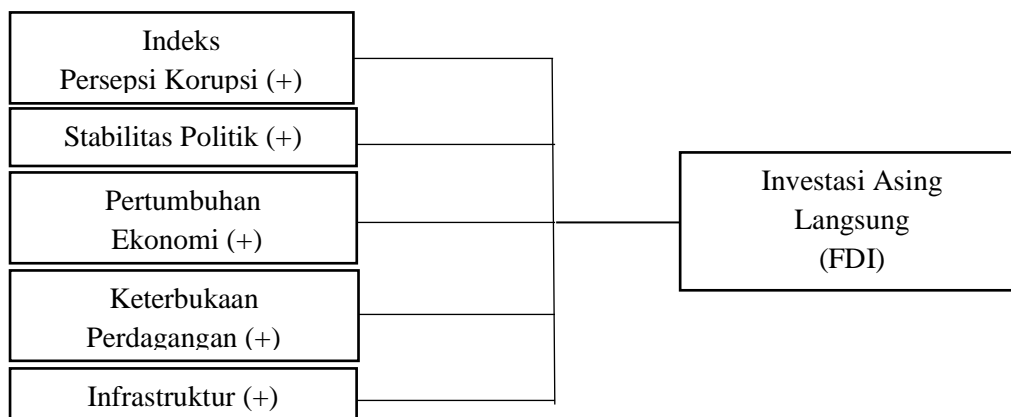
C. Kerangka Pemikiran

Indikator kunci yang mencirikan keberhasilan pembangunan di suatu negara salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod-Domar (Mankiw, 2006) pertumbuhan ekonomi didapatkan dengan cara peningkatan kapasitas produksi yang ditopang oleh kenaikan pada investasi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih ditopang investasi daripada konsumsi dianggap akan meningkatkan produktivitas suatu negara. Pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang yang berkelanjutan menjadi salah satu alasan mengapa *Foreign Direct Investment* (FDI) diperlukan, khususnya di negara-negara berkembang yang mengalami kekurangan akumulasi modal untuk pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai determinan FDI telah cukup intensif dilakukan, baik di negara maju maupun berkembang. Penelitian sebelumnya tentang faktor penentu pentingnya FDI di negara berkembang berpendapat bahwa kualitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas kelembagaan yang rendah sering kali dikaitkan dengan

investasi yang lebih rendah, hal tersebut dikarenakan adanya praktik korupsi yang menyebabkan tingginya biaya transaksi dan membuat investor enggan untuk berinvestasi. Padahal negara berkembang membutuhkan FDI untuk menyerap potensi yang ada pada negara tersebut. Selain itu, pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada negara berkembang cenderung besar dan sebagian besar dapat dipengaruhi tingkat spekulasi investor terhadap situasi rentan, stabilitas politik, dan konflik pada negara yang dituju.

Selain faktor-faktor yang berkaitan dengan institusi tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap FDI. Menurut Shah (2014) faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan juga infrastruktur turut mempengaruhi aliran FDI yang masuk di suatu negara. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 di atas menjelaskan bagaimana variabel yang akan di uji yaitu indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap aliran masuk FDI di 10 negara anggota ASEAN. Hasil dari studi empiris yang ada dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kelima variabel bebas tersebut terhadap aliran masuk FDI di 10 negara anggota ASEAN pada 2010-2019.

D. Hipotesis

Dari hasil yang diperoleh dari kajian teoritis dan studi empiris yang telah dijelaskan maka hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

H1 : Diduga variabel indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN.

H2 : Diduga variabel stabilitas politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN.

H3: Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN.

H4: Diduga variabel keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN.

H5: Diduga variabel infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN.

H6: Diduga indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap investasi asing langsung (FDI) di ASEAN.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel di sepuluh Negara anggota ASEAN. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur dari 10 negara berbeda terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Negara tersebut yaitu, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam. Data-data tersebut diperoleh dari *website World Bank*, *Transparency International* dan *World Economic Forum (WEF)*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tahunan dalam bentuk *time series* (runtun waktu) dan *cross section*. Di mana data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
Investasi Asing Langsung	FDI	USD	<i>World Bank</i>
Indeks Persepsi Korupsi	CPI	Indeks	<i>Transparency International</i>
Stabilitas Politik	PS	Indeks	<i>World Bank</i>
Pertumbuhan Ekonomi	EG	Persen	<i>World Bank</i>
Keterbukaan Perdagangan	TO	Persen	<i>World Bank</i>
Infrastruktur	GFCF	Persen	<i>World Bank</i>

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan penjelasan mengenai variabel-variabel operasional yang ada sebagai berikut :

1. Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) sebagai variabel terikat yang digunakan adalah kegiatan penanaman modal riil (aset-aset produktif) yang dilakukan oleh investor luar negeri ke suatu negara, penanaman modal asing tersebut bisa sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah US\$. Data ini diperoleh dari *World Bank (World Development Indicators)* untuk 10 negara ASEAN pada periode 2010-2019.

2. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks persepsi korupsi merupakan suatu penilaian kualitas pemerintahan melalui perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (*Transparency International*). Pengukuran indeks persepsi korupsi ini menggunakan satuan indeks 0-100, di mana semakin rendah indeks persepsi korupsi (CPI) atau mendekati 0 artinya tingkat korupsi di suatu negara sangat tinggi (terkorup), dan sebaliknya semakin tinggi indeks persepsi korupsi (CPI) atau mendekati 100 maka negara tersebut bersih dari praktik korupsi. Data indeks pengukuran korupsi ini diperoleh dari *Tranparancy International* untuk 10 negara ASEAN pada periode 2010-2019.

3. Stabilitas Politik

Stabilitas politik mengacu kepada bagaimana pemerintahan di sebuah negara tetap kuat dan stabil berdiri meskipun terdapat usaha untuk menjatuhkannya (Kaufmann et al., 2011). Kestabilan politik merupakan suatu keadaan yang terkait dengan banyaknya kegiatan revolusi, termasuk kudeta di negara bersangkutan (Knack and Keefer, 1995). Pengukuran indeks stabilitas politik ini menggunakan *estimate of*

governance (perkiraan tata kelola) dengan rentang -2.5 sampai 2.5 *governance performance* (kinerja tata kelola). Skor -2.5 menunjukkan tingkat terendah stabilitas politik, sementara skor 2.5 menunjukkan tingkat tertinggi stabilitas politik. Data ini diperoleh dari *World Bank (World Governance Indicators)* untuk 10 negara ASEAN pada periode 2010-2019.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN yang diperoleh dari *World Bank (World Development Indicators)*, data yang diambil merupakan data sekunder yang berupa kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dengan data lintas individu (*cross section*) untuk 10 negara di ASEAN pada periode 2010-2019. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persen (%) dengan rumusan: $\Delta EG = \frac{PDBt - PDBt-1}{PDBt-1} \times 100\%$ sehingga diperoleh hasil satuan dalam bentuk persen (%).

5. Keterbukaan Perdagangan

Menurut Indrayani et al. (2016) keterbukaan perdagangan mengacu pada tingkat di mana Negara atau Ekonomi mengizinkan atau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Semakin banyak suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain, maka negara tersebut semakin terbuka ekonominya. Sesuai dengan penelitian Indrayani et al. (2016) dan Shah (2014), dalam penelitian ini tingkat keterbukaan perdagangan diukur menggunakan total perdagangan negara (*trade*). Menurut definisi *World Bank*, perdagangan (*trade*) adalah jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur sebagai bagian dari produk domestik bruto. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persen (%) dengan rumusan: $Trade = \frac{(X+M)}{PDB} \times 100\%$. Data ini diperoleh dari *World Bank (World Development Indicators)* untuk 10 negara ASEAN pada periode 2010-2019.

6. Infrastruktur

Dalam penelitian ini infrastruktur adalah pembentukan modal tetap bruto (*Gross Fixed Capital Formation/GFCF*) seperti pada penelitian sebelumnya oleh Septiantoro et al. (2020), Indrayani et al. (2016) dan Shah (2014) yang menggunakan *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) sebagai proxy dari infrastruktur. Menurut definisi dari *World Bank* (2018) GFCF merupakan persenan dari GDP yang terdiri dari pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. GFCF tersebut dapat berbentuk perbaikan lahan; pembelian pabrik, mesin, dan peralatan; dan pembangunan jalan, kereta api dan sebagainya, termasuk sekolah, rumah sakit, kantor, tempat tinggal pribadi, serta bangunan komersial dan bangunan industri. Hal ini sesuai dengan Mankiw (2010), bahwa infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur bersifat jangka panjang, hal ini berkaitan dengan pembiayaan dan pemeliharaan.

Pemilihan GFCF sebagai *proxy* infrastruktur ini didasarkan pada anggapan bahwa pengukuran infrastruktur lain seperti jalan, telepon dan pelabuhan, hanya mencerminkan infrastruktur yang ada dan bukan infrastruktur potensial seperti yang termasuk dalam GFCF. Oleh karena itu, GFCF dianggap mewakili baik infrastruktur yang ada maupun yang potensial. Data GFCF yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tahunan dalam satuan persen (%) dengan perbandingan menggunakan GDP, data ini diperoleh dari *World Bank (World Development Indicators)* untuk 10 negara ASEAN pada periode 2010-2019.

C. Metode Analisis

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya menggunakan bantuan program *Eviews*. Analisis data panel adalah gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan data *cross section* (antar individu/ruang). Untuk data *time series* dalam penelitian ini, digunakan periode waktu yang panjang atau bersifat dinamis. Data dinamis ini digunakan karena nilai suatu variabel mungkin

tidak hanya dipengaruhi oleh nilai variabel lain pada periode yang sama tetapi juga oleh nilai variabel pada titik waktu yang berbeda.

1. Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data yang disusun berdasarkan runtun waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan untuk data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perseorangan. Dalam penelitian ini, penggabungan dari kedua jenis data tersebut dapat dilihat bahwa variabel terikat yang ada terdiri dari beberapa negara (*cross section*) dan dalam berbagai periode waktu (*time series*). Data yang seperti ini yang disebut sebagai data panel. Dalam menganalisis menggunakan regresi data panel terdapat tiga model pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data panel yaitu Efek Sederhana/Umum (*Common Effect Model*), Efek Tetap (*Fixed Effect Model*), dan Efek Acak (*Random Effect Model*).

Menurut Gujarati (2012), data panel memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

- 1) Kombinasi dari observasi *cross section* dan *time series* membuat data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, dan kolinieritasnya lebih kecil antar variabel serta lebih efisien.
- 2) Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan dengan melihat hasil observasi dari *cross section*.
- 3) Dampak yang tidak dapat dilihat pada data *cross section* murni dan *time series* murni dapat dideteksi dengan menggunakan data panel.
- 4) Data panel mempermudah dalam mempelajari model perilaku yang rumit dan juga membuat data menjadi berjumlah ribuan unit.

Model regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan model semi log sebagai berikut :

$$\text{LogFDI}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{CPI}_{it} + \beta_2 \text{PS}_{it} + \beta_3 \text{EG}_{it} + \beta_4 \text{TO}_{it} + \beta_5 \text{GFCF}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

LogFDI_{it}	= Investasi Asing Langsung (US\$).
CPI_{it}	= Indeks Persepsi Korupsi (Indeks).
PS_{it}	= Stabilitas Politik (Indeks).
EG	= Pertumbuhan Ekonomi (Persen).
TO	= Keterbukaan Perdagangan (Persen).
GFCF	= Infrastruktur (Persen).
i	= 1,2,...n, menunjukkan jumlah lintas individu (<i>cross-section</i>)
t	= 1,2, . . .t, menunjukkan jumlah lintas individu (<i>time series</i>).
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ & β_6	= Koefisien Regresi
ε_{it}	= <i>error term</i>

D. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data adalah urutan-urutan yang dilakukan dalam melakukan analisis terhadap suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur analisis yaitu :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan pada penelitian ini. Analisis yang dihasilkan berupa tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan simpangan baku (*standard deviation*) untuk semua variabel tersebut.

2. Metode Estimasi Regresi Data Panel

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan metode mana yang lebih sesuai maka digunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, Uji *Lagrange Multiplier*. Berikut penjelasan masing-masing metode:

a. Metode *Common Effect Model* (CEM)

Model *Common Effect* adalah model yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Dengan hanya

menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Bentuk persamaan untuk model CEM adalah sebagai berikut : (Gujarati, 2012)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} dan X_{2it} = Variabel Bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 = Konstanta

β_1 dan β_2 = Koefisien Regresi

ε = *Error Terms*

b. Metode *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik *variable dummy* yang memiliki nilai 0 untuk variabel yang tidak memiliki pengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh (Kuncoro, 2011). Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *least Squares Dummy Variable (LDSV)*.

Bentuk persamaan untuk model FEM adalah sebagai berikut : (Gujarati, 2012)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_n D_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} dan X_{2it} = Variabel Bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

$D_1, D_2, D_3 \dots D_n = 1$ untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 dan β_3 = Koefisien Regresi

ε = *Error Terms*

c. Metode *Random Effect Model* (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Squar (GLS)*. Bentuk persamaan untuk model FEM adalah sebagai berikut : (Gujarati, 2012)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

3. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Menurut Basuki (2016), untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

a. Uji Chow

Uji *Chow* merupakan pengujian statistik untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji *Chow* adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \text{Common Effect Model}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila nilai chow statistik (F-statisik) > dari F tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan pengujian statistik untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang dibentuk dalam *Hausman test* adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \text{Random Effect Model}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila nilai F-statistik hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier

Merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah model *random effect* atau pada metode *commont effect* yang paling tepat untuk digunakan. Uji LM ini digunakan ketika pada uji Chow dan uji Hausman sebelumnya menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect Model*, tetapi jika hasilnya menunjukkan *Random Effect Model* yang lebih tepat digunakan maka pada tahap akhir uji LM diperlukan untuk menentukan model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat.

Hipotesis yang dibentuk dalam LM test adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Random Effect Model*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Model utama regresi berganda yang dijelaskan sebelumnya harus memenuhi syarat asumsi klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Residual

Model uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau kah mutlak regresi yang baik. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data residualnya. Uji ini untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variable independen dan dependen apakah mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, kita dapat menguji dengan menggunakan uji Jarque bera dan t-statistik. Berikut hipotesisnya :

H_0 : Residu tersebar normal

H_a : Tersebar tidak normal

Kriteria pengujiannya adalah :

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $P \text{ value} < P \text{ tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $P \text{ value} > P \text{ tabel}$.

b. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada hubungan antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi hanya pada persamaan regresi berganda dan umumnya terjadi pada data runtun waktu (*time series*) ada multikolinieritas antara X_1 dan X_2 : $X_1 = \gamma X_2$ atau $X_2 = \gamma^{-1} X_1$ jika :

$X_1 = X_2 + X_3$ terjadi *perfect multicollinearity*

$X_2 = 4X_1$ (*perfect multicollinearity*)

$X_3 = 4X_1 + \text{bilangan random}$ (tidak *perfect multicollinearity*)

Jika dua variabel independen atau lebih saling mempengaruhi, masih bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi koefisien persamaan regresi dalam mendapatkan *estimator* yang BLUE. *Estimator* yang BLUE tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah Multikolinieritas. *Estimator* BLUE hanya berhubungan dengan asumsi tentang variabel gangguan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari Asumsi *Classical Linier Regression Model* yang sering muncul pada data *cross-section*, yang menghasilkan estimasi *error term* yang bias dan *irrelevant*. Heteroskedastisitas dapat pula diartikan sebagai keadaan di mana faktor gangguan tidak memiliki varians yang sama. Model yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model yaitu uji *white*. Uji *White* dapat menjelaskan apabila nilai probabilitas $\text{obs} \cdot R\text{-square}$ lebih kecil dari α (5%), maka data terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya bila nilai probabilitas $\text{obs} \cdot R\text{-square}$ lebih besar dari α (5%) maka data tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama yang lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat di uji melalui uji Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson *statistic* terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%. Berikut hipotesisnya :

H_0 : Tidak ada Autokorelasi

H_a : Ada Autokorelasi

5. Pengujian Hipotesis

Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini memiliki kegunaan dalam penarikan kesimpulan penelitian, selain itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Terdapat tiga bentuk pengujian yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinasi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji-T Statistik

Menurut Gujarati (2007) uji t atau juga pengujian regresi antar variabel dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (variabel bebas) secara individual mempengaruhi variabel dependennya (variabel terikat). Hipotesis pengujian ini yaitu :

H_0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_a : Variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% dengan derajat kebebasan ($df = (n-k)$). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

Jika H_0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji t adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Investasi Asing Langsung
 $H_0 : \beta_2 = 0$ artinya Indeks Persepsi Korupsi tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung.
 $H_a : \beta_2 > 0$ artinya Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.
2. Pengaruh Stabilitas Politik terhadap Investasi Asing Langsung
 $H_0 : \beta_1 = 0$ artinya stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung.
 $H_a : \beta_1 > 0$ artinya stabilitas politik berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi Asing Langsung
 $H_0 : \beta_3 = 0$ artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung.
 $H_a : \beta_3 > 0$ artinya Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.
4. Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Investasi Asing Langsung
 $H_0 : \beta_3 = 0$ artinya Keterbukaan Perdagangan tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung.
 $H_a : \beta_3 > 0$ artinya Keterbukaan Perdagangan berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.
5. Pengaruh Infrastruktur terhadap Investasi Asing Langsung
 $H_0 : \beta_3 = 0$ artinya Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung.
 $H_a : \beta_3 > 0$ artinya Infrastruktur berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

b. Uji-F Statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui variabel independen (variabel bebas) yang masuk dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen (variabel terikat). Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 1%, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F dengan cara membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-tabelnya (Gujarati, 2007). Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :

H_0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

H_a : Variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Dalam uji F apabila nilai F-hitung \geq nilai F tabel maka H_0 ditolak, dan H_a diterima, artinya variabel independen (variabel bebas) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat) secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila F-hitung \leq F-tabel, maka variabel independen (variabel bebas) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat) secara bersama-sama.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variabel terikat atau untuk mengukur kebaikan suatu model. Menurut Gujarati (2012), Koefisien Determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). Besaran R^2 berkisaran antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika R^2 semakin mendekati satu, maka model tersebut baik dan pengaruh antara variabel dependen semakin kuat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi parsial (uji T-statistik) menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas terdiri dari indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di 10 negara anggota ASEAN pada 2010-2019.
2. Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikansi simultan (uji F-statistik) menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas terdiri dari indeks persepsi korupsi, stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2010-2019.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah di setiap negara anggota ASEAN sebaiknya bersikap lebih tegas lagi dalam memberantas korupsi dan menegakkan aturan hukum terhadap oknum-oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi agar merasa jera dan takut untuk melakukan korupsi kembali. Hal tersebut guna meminimalisir praktik korupsi yang terjadi sehingga indeks persepsi korupsi

(CPI) negara-negara anggota ASEAN dapat meningkat dan dapat menarik lebih banyak lagi minat para investor asing untuk menanamkan modalnya.

2. Kinerja tata kelola pemerintah dalam hal stabilitas politik di masing-masing negara anggota ASEAN sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar kestabilan politik di negaranya bisa terjaga dan iklim investasi yang kondusif dapat tercapai. Untuk dapat mencapai kestabilan politik di negaranya, masing-masing pemerintah negara anggota ASEAN harus lebih selektif dalam membuat kebijakan, aturan hukum, dan mengambil keputusan agar tidak memicu guncangan politik seperti demonstrasi anti pemerintah, demonstrasi menentang perubahan kabinet maupun perubahan konstitusional, revolusi, kerusuhan, kudeta, perang perbatasan, perang sipil, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan kestabilan politik suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya, selain itu kondisi politik yang stabil juga akan berpengaruh terhadap operasional negara itu sendiri.
3. Pemerintah di setiap negara anggota ASEAN harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor penentu yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masuknya aliran FDI. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan ukuran pasar konsumen yang semakin besar serta menunjukkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan inovasi dan pembaharuan teknologi.
4. Pemerintah di setiap negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kerja sama internasional dan mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional dengan mitra dagang dan membuka kemungkinan untuk kerja sama bidang ekonomi yang baru dengan negara lain untuk meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, pemerintah juga hendaknya menggalakkan program untuk meningkatkan volume perdagangan seperti melakukan *export promotion*.

5. Pemerintah di setiap negara anggota ASEAN harus memaksimalkan kondisi infrastrukturnya, dengan cara membangun infrastruktur-infrastruktur yang potensial dalam menarik minat investor asing untuk berinvestasi di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M., and Badshah, I. (2015). Preferences of Institutional Investors at Karachi Stock Exchange. *Int'l Conference on Business, Marketing & Information System Management, 2004*, 1–4.
- Abdella, A. B., Naghavi, N., and Fah, B. C. Y. 2018. The Effect of Corruption, Trade Openness and Political Stability on Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from BRIC Countries. *International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(3)*, 32–38.
- Aditjondro, G. J. 2003. Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia. *Jurnal Wacana, 22*(Insist Press).
- Alemu, A. M. 2012. Effects of Corruption on FDI Inflow in Asian Economies. *Seoul Journal of Economics, 25(24)*, 387–412.
- Amalia, N. 2017. Analisis Pengaruh Stabilitas Politik Dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Investasi Asing Langsung Di Asia Tenggara. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomin (JOM Fekon), 4(1)*, 1095–1105.
- Anggraeni, A., dan Sulasmiyati, S. (2019). Pengaruh Corruption Perception Index, Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga Terhadap Foreign Direct Investment (Studi Pada Negara ASEAN periode 2012-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis, 73(1)*, 1–10.
- Arinta, C. D. 2018. Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Investasi, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Universitas Airlangga*.
- Arshita, P. D., dan Mawardi, M. K. 2018. Pengaruh Daya Saing Global Terhadap Nilai Investasi Filipina di Indonesia (Studi pada Nilai Foreign Direct Investment Filipina di Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 59(1)*, 171–179.
- Azansyah. 2013. Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia, Dan Membangun Lembaga Yang Efektif. *Bisnis Islam (EKBISI), 7(2)*, 262 – 279.
- Bank, W. 2017. *Global Investment Competitiveness*.
- Barro, R. J. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly*

Journal of Economics.

- Basuki, Agus Tri. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bénassy-Quéré, A., Coupet, M., and Mayer, T. 2007. Institutional Determinants of Foreign Direct Investment. *World Economy*, 30(5), 764–782.
- Busse, M., and Hefeker, C. 2011. Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment. *SSRN Electronic Journal*.
- Butler, K. C., and Joaquin, D. C. 1998. A Note on Political Risk and the Required Return on Foreign Direct Investment. *Journal of International Business Studies*.
- Dunning, J. H. 1998. Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor?. *Journal of International Business Studies*, 40(1), 45–66.
- F., A. W., and Keynes, J. M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. *Journal of the Royal Statistical Society*.
- Fahmi, M. R. (2012). Analyzing the relationship between tax holiday and foreign direct investment in Indonesia. *Ritsumeikanasia Pacific University Japan*.
- Griffen, R. W., and Pustay, M. W. 2015. Building Global Skills. *International Business: A Managerial Perspective*.
- Gujarati, D.N. 2007. *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat*, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Gupta, S., Davoodi, H. R., and Tiongson, E. 2000. Corruption and the Provision of Health Care and Education Services. *IMF Working Papers (Vol. 00, Issue 116, p. 1)*.
- Habib, M., and Zurawicki, L. 2002. Corruption and Foreign Direct Investment. *Journal of International Business Studies*.
- Hakimi, A., and Hamdi, H. 2017. Does corruption limit FDI and economic growth? Evidence from MENA countries. *International Journal of Emerging Markets*.
- Hoang, H. H. (2012). Foreign Direct Investment in Southeast Asia: Determinants and Spatial Distribution. *Depocen*, 30, 1–24.
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 6. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE). Yogyakarta.
- Indrayani, E., Susyuhendra, E., and Utomo, E. L. Y. S. 2016. Determining Factors Influencing Foreign Direct Investment in ASEAN Countries. *March*, 71–76.

- Kaufmann, D., Kraay, A., and Mastruzzi, M. 2011. The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*.
- Ketkar, K. W., Murtuza, A., and Ketkar, S. L. 2005. Impact of Corruption on Foreign Direct Investment and Tax Revenues. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 17(3), 313–341.
- Knack, S., and Keefer, P. 1995. Institutions And Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures. *Economics and Politics*.
- Kok, R., and Ersoy, B. A. 2009. Analyses of FDI Determinants in Developing Countries. *International Journal of Social Economics*.
- Krueger, Anne O. 2000. Government Failure in Development. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 4, Issues 3, Summer: 9-23.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., and Vishny, R. 1999. The Quality of Government. *Journal of Law, Economics, and Organization*.
- Lucas, R. E. 1990. Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? *American Economic Review*.
- MangkoesOebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mankiw, N. G. 2010. Macroeconomics (7th Ed). In *Worth Publishers*.
- Marin, D., and Schnitzer, M. 2011. When is FDI a capital flow? *European Economic Review*.
- Mauro, P. 2004. The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth. *IMF Staff Papers*.
- Moosa, I. A. 2002. Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice. *Choice Reviews Online*.
- Putri, H. D. 2018. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Negara-negara ASEAN Tahun 2007-2015. *Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Manajemen, D A N*.
- Quazi, R. M. 2014. Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Rashid, M., Looi, X. H., and Wong, S. J. 2017. Political Stability and FDI in the Most Competitive Asia Pacific Countries. *Journal of Financial Economic Policy*.
- Rugman, A. M. 1981. A Test of Internalization Theory. *Managerial and Decision Economics*, 2(4), 211–219.

- Saidi, Y., Ochi, A., and Ghadri, H. 2013. Governance and FDI Attractiveness: Some Evidence from Developing and Developed Countries. *Global Journal of Management and Business Research Finance*.
- Sasana, H. 2004. Kegagalan Pemerintah Dalam Pembangunan. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*
- Septiantoro, A. A., Hasanah, H., Alexandi, M. F., dan Nugraheni, S. R. W. 2020. Apakah Kualitas Institusi Berpengaruh pada Arus Masuk FDI di ASEAN? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.
- Shah, M. H. 2014. The Significance of Infrastructure for FDI Inflow in Developing Countries. *Journal of Life Economics, 2(Rating Academy)*, 1–16.
- Shahzad, A., Al-Swidi, A. K., Mithani, D. A., Bt Fadzil, F. H., & Bin Golamuddin, A. G. (2012). An Empirical Investigation on The Effect of Business Environment Factors on The FDI Inflows in Pakistan: The Moderating Role of Political Stability. *Business and Economic Research, 2(2)*.
- Stückelberger, C. 2010. *Corruption-Free Churches are Possible*. Globethics.net.
- Sukirno, S. 2006. *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta.
- Tanzi, V., and Davoodi, H. R. 1997. Corruption, Public Investment, and Growth. *IMF Working Papers (Vol. 97, Issue 139, p. 1)*.
- Todaro, M, P., and Smith, S, C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Todaro MP, S. S. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (S. Barnadi D & H. W. S (eds.))*. Penerbit Erlangga.
- Tuman, J. P., and Emmert, C. F. 2004. The Political Economy of U.S. Foreign Direct Investment in Latin America: A Reappraisal. *Latin American Research Review*.
- Wei, S.-J. 2000a. How Taxing is Corruption on International Investors. *The Review of Economics and Statistics, 82*, 1–11.
- Wei, S. J. 2000b. Local Corruption and Global Capital Flows. *Brookings Papers on Economic Activity, 2000(2)*, 303–354.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Yustika, A. E. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.
- Zhao, J. H., Kim, S. H., and Du, J. 2015. The Impact of Corruption and Transparency on Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis. *43(1)*, 41–62.